

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA DI KELURAHAN CIGENDING
KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Pekerjaan Sosial (S. Tr .Sos)

Pembimbing :

Drs. Abas Basuni, M.Soc. Admin

Sri Ratna Ningrum, S.Sos, MPS.Sp

Disusun Oleh :

Rahmawati Rukman Putri

NRP. 20.04.046



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA DI KELURAHAN CIGENDING
KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG**

Oleh: RAHMAWATI RUKMAN PUTRI

20.04.046

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing
pada tanggal 19 Juli 2024**

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Dra. Abas Basuni, M.Soc. Admin

NIP. 196202121987031003

Sri Ratna Ningrum, S.Sos, MPS.Sp

NIP. 197401102006042002

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA DI KELURAHAN CIGENDING
KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG**

Oleh: RAHMAWATI RUKMAN PUTRI

20.04.046

**Skripsi ini telah disetujui dan dinyatakan lulus
pada tanggal 19 Juli 2024**

Pembimbing

**Dra. Abas Basuni, M.Soc. Admin
NIP. 196202121987031003**

**Sri Ratna Ningrum, S.Sos, MPS.Sp
NIP. 197401102006042002**

Mengetahui,

Direktur Poltekesos Bandung

Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Sarjana Terapan

**Suharma, S.Sos., Ph.D
NIP. 196803151998031001**

**Dr. Denti Kardeti, Msi.
NIP. 196612241993032002**

PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah (2:286))

"Tidak ada perubahan tanpa keberanian untuk memulai. Tidak ada kemajuan tanpa keberanian untuk melangkah."

- Najwa Shihab.

Dengan segenap ketulusan hati, saya persembahkan tugas akhir ini kepada Bapak, Mamah, serta keluarga terdekat yang telah banyak berjuang memberikan do'a, kebahagiaan dan kasih sayang.

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi milik orang lain. Karya ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun dan di sumber manapun termasuk kepada perguruan tinggi atau lembaga lain manapun. Sumber informasi yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari penulis lain dalam karya yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi.

Bandung, 15 Juli 2024

Rahmawati Rukman Putri
(2004046)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Rahmawati Rukman Putri, lahir di Garut pada tanggal 18 April 2002 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan formal pertama di Taman Kanak-kanak Ananda Ciwidey pada tahun 2007, peneliti melanjutkan pendidikan formal kedua di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibadak Andir Bandung pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan formal ketiga di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 32 Bandung pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan formal keempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 15 Bandung dengan jurusan pekerjaan sosial pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Peneliti melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa pada Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada tahun 2020. Peneliti aktif mengikuti organisasi dalam kampus seperti Hima Peksos, UKM Pers Journal367 dan organisasi luar kampus seperti Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Kota Bandung. Salah satu prestasi yang pernah peneliti raih selama menjadi mahasiswa adalah mendapat gelar Juara 1 pada kompetisi Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan kategori essay tahun 2023.

ABSTRAK

RAHMAWATI RUKMAN PUTRI. 2004046. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Dibimbing oleh Abas Basuni dan Sri Ratna Ningrum.

Kemiskinan menjadi isu utama di Kelurahan Cigending. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), yang dibawah oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending dengan fokus pada lima aspek utama yakni standar dan sasaran program, sumber daya program, hubungan kemitraan, karakteristik dan sikap agen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari kader UP2K, pelaku usaha dan kasi ekonomi pembangunan kelurahan Cigending. Hasil penelitian pada aspek standar dan sasaran program menunjukkan bahwa program UP2K memiliki berbagai peraturan dalam pelaksanaannya yang sarasannya adalah masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan.. Dalam aspek sumber daya manusia yang terlibat dalam program UP2K meliputi kader Pokja 2 dan pelaku usaha, sementara sumber daya non-manusia mencakup pemberian modal dan fasilitas pemasaran. Aspek agen pelaksana pada program UP2K lebih banyak berfokus pada pemberian simpan pinjam modal dan pelatihan yang hanya mengikuti arahan dari kecamatan sebagai mitra utama. Pada aspek kemitraan UP2K bekerja sama dengan pihak kecamatan dan koperasi kelurahan. Pada aspek kondisi sosial UP2K memberikan perubahan sosial dalam hal kebersamaan dan interaksi antara kelompok masyarakat dan pada aspek ekonomi ditemukan bahwa UP2K mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui kegiatan kelompok usaha. Untuk memaksimalkan potensi program UP2K diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas agen pelaksana di tingkat kelurahan. Peneliti mengusulkan program "Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing" untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader UP2K agar mampu menjalankan program dengan optimal.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

ABSTRACT

RAHMAWATI RUKMAN PUTRI. 2004046. Implementation of the Family Income Improvement Program (UP2K) in Cigending Subdistrict, Ujung Berung District, Bandung City. Supervised by Abas Basuni and Sri Ratna Ningrum.

Poverty remains a significant issue in various regions of Indonesia, including Cigending Subdistrict, Ujung Berung District, Bandung City. One of the efforts to alleviate poverty is through the Family Income Improvement Program (UP2K), overseen by the Empowerment and Family Welfare Movement (PKK). This research aims to examine the implementation of the UP2K program in Cigending Subdistrict, focusing on five main aspects: program standards and targets, program resources, partnership relationships, characteristics and attitudes of implementing agents, and social and economic conditions. The method used is a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation study techniques involving seven informants, consisting of UP2K cadres, entrepreneurs, and the Head of Economic Development. The research findings indicate that although the program's goals and targets are clear, understanding and implementation at the subdistrict level remain suboptimal. Human resources in this program include Pokja 2 cadres and entrepreneurs, while non-human resources encompass capital provision and marketing facilities. Implementing agents primarily focus on providing revolving loan capital and training, which merely follows the directions from the subdistrict as the main partner. A significant obstacle is the lack of in-depth understanding of the UP2K program among implementing agents. The UP2K program has great potential to improve the local economy if implementing agents can optimize its implementation. To maximize the program's potential, enhancing the understanding and capacity of implementing agents at the subdistrict level is necessary. The researcher proposes the "Training and Capacity Development of Cadres Towards Competitive UP2K" program to enhance the understanding and capacity of UP2K cadres to run the program optimally. This training includes socialization of UP2K implementation guidelines, counseling on family economic empowerment, and entrepreneurship skill development.

Keywords: Poverty, Implementation, UP2K

KATA PENGANTAR

Segala puji tercurah limpahkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga dapat diberikan kesempatan, kemudahan serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung” dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka pelaksanaan penelitian di lapangan dan penyusunan hasil skripsi ini tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses panjang penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Suharma, Ph.D. selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dr. Denti Kardeti, M.Si selaku Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
3. Drs. Abas Basuni, M.Soc. Admin dan Sri Ratna Ningrum S.Sos, MPS.Sp selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Jajaran perangkat Kelurahan Cigending, TP PKK Kelurahan Cigending, dan masyarakat Kelurahan Cigending atas waktu, kemudahan informasi serta kolaborasi yang terjalin selama proses pengumpulan data di lapangan.
5. Agung Widiana Nugraha, Muthia Afifah, Icha Anggia, Raisa Kamilah, dan Muhammad Fadlan Rayhan sebagai teman terdekat peneliti atas dukungan dan

kebersamaan yang terjalin dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini berakhir.

6. Rekan-rekan praktikum laboratorium, praktikum institusi, praktikum komunitas dan kelompok bimbingan skripsi atas dukungan, kebersamaan, dan komunikasi yang terus terjalin selama proses pengerjaan skripsi ini.

Peneliti berharap penyusunan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak serta menambah pengetahuan di bidang Pekerjaan Sosial. Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik pada isi maupun susunannya. Maka dari itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Bandung, 15 Juli 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	i
RIWAYAT HIDUP	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian	13
2.2.1 Tinjauan Tentang Implementasi	13
2.2.2 Tinjauan Tentang Program Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga	25
2.2.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan.....	28
2.2.4 Tinjauan Tentang Praktik Pekerja Sosial dengan Kemiskinan.....	34
2.2.5 Tinjauan Tentang Praktik Pekerja Sosial dengan Komunitas.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Desain Penelitian	45
3.2 Penjelasan Istilah	45
3.3 Penjelasan Latar Penelitian.....	46
3.4 Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data	46
3.4.1 Sumber Data.....	46
3.4.2 Cara Menentukan Sumber Data	47

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49
3.7 Teknik Analisa Data.....	50
3.8 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Cigending	54
4.1.2 Kondisi Umum Kelurahan Cigending	56
4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Karakteristik Informan.....	65
4.2.2 Standar dan Sasaran Program UP2K.....	68
4.2.3 Sumber Daya Program UP2K	74
4.2.4 Karakteristik dan Sikap Agen Pelaksana Program UP2K.....	88
4.2.5 Hubungan Antar Organisasi atau Kemitraan Program UP2K.....	94
4.2.6 Kondisi Sosial	98
4.2.7 Kondisi Ekonomi Penerima Program UP2K.....	104
4.3 Pembahasan	107
4.3.1 Analisa Hasil Penelitian.....	107
4.3.2 Analisa Masalah.....	117
4.3.3 Analisa Kebutuhan.....	119
4.3.4 Analisa Sistem Sumber.....	120
BAB V USULAN PROGRAM.....	124
5.1 Dasar Pemikiran.....	124
5.2 Nama Program	125
5.3 Tujuan Program	125
5.3.1 Tujuan Umum.....	125
5.3.2 Tujuan Khusus	126
5.4 Sasaran Program	119
5.5 Pengorganisasian Program.....	128
5.6 Metode dan Teknik	131
5.5.1 Metode	131

5.5.2 Teknik.....	131
5.7 Kegiatan yang Dilakukan	132
5.8 Langkah-langkah Pelaksanaan.....	133
5.9 Rencana Anggaran Biaya	137
5.10 Analisis Kelayakan Program	139
5.11 Indikator Keberhasilan.....	140
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	141
6.1 Simpulan.....	141
6.2 Saran	143
6.2.1 Saran Guna Laksana	143
6.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya	137
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Bandung	3
Gambar 1.2 Jumlah Kemiskinan di Kecamatan Ujung Berung	4
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Cigending.....	58
Gambar 4.2 Kegiatan Bazar Ramadhan Tahun 2024	82
Gambar 4.3 Penggunaan media sosial	84
Gambar 4.4 Penggunaan media sosial Usaha Abon Lele	84
Gambar 4.5 Kebersamaan Kelompok Usaha Abon Lele Saat Proses Produksi..	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Masa Pemerintahan Desa (Kades).....	57
Tabel 4.2 Masa Pemerintahan Kelurahan (Lurah)	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	59
Tabel 4.5 Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Ujung Berung.....	60
Tabel 4.6 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.7 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.8 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.9 Rekapitulasi Aspek Standar dan Sasaran Program.....	73
Tabel 4.10 Rekapitulasi Aspek Sumberdaya Program	89
Tabel 4.11 Rekapitulasi Aspek Karakteristik dan Sikap Agen Pelaksana	98
Tabel 4.12 Rekapitulasi Aspek Hubungan Kemitraan	102
Tabel 4.13 Rekapitulasi Aspek Kondisi Sosial	106
Tabel 4.14 Rekapitulasi Aspek Kondisi Ekonomi.....	106
Tabel 5.1 Rencana Anggaran Biaya Program	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

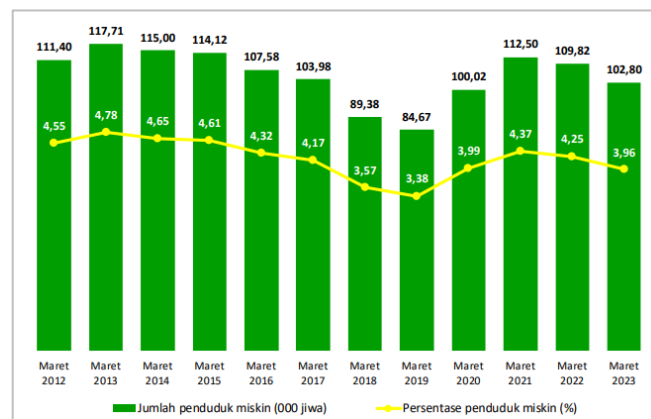
Kemiskinan sering diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi hak dasar mereka untuk hidup secara bermartabat. Sementara itu, Badrul Munir (2002) menyatakan bahwa sebuah negara dianggap miskin jika memiliki pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mayoritas tenaga kerja bergerak di sektor pertanian.

Fenomena kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah realitas sosial yang memerlukan perhatian serius. Masalah kemiskinan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya serta menghadirkan tantangan yang signifikan dalam upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin saat ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti pada gambar berikut.

Dalam konteks pulau-pulau di Indonesia, Pulau Jawa menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 13,62 juta jiwa. Sebaliknya, pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kalimantan, dengan hanya 0,97 juta jiwa. Sementara itu, Posisi jumlah penduduk miskin terbanyak ada pada provinsi Jawa

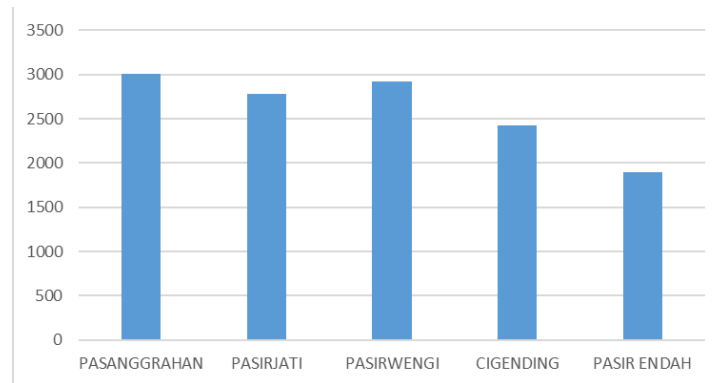
Timur dengan mencapai 4,1 juta jiwa, dan posisi kedua yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan masing-masing 3,8 juta jiwa dan 3,7 juta jiwa.

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat beserta kabupaten/kota di sekitarnya merupakan salah satu dari rangkaian wilayah tingkat II dengan tingkat pembangunan ekonomi yang relatif dinamis (BPS Kota Bandung, 2023). Namun, dengan perkembangan ekonomi tersebut, wilayah Kota Bandung juga memiliki dinamika kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Gambar berikut memperlihatkan persentase penduduk miskin di wilayah Kota Bandung.



Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Bandung
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Pada periode Maret 2012 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami tren penurunan, baik dari segi jumlah maupun persentase. Namun, dari Maret 2020 hingga Maret 2021, terjadi peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kota Bandung. Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung mencapai 102,80 ribu jiwa. Meskipun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin, kenyataannya angka kemiskinan di Kota Bandung masih cukup tinggi.



Gambar 1.2 Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2023

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandung yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Ujung Berung menjadi salah satu wilayah di Kota Bandung dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 terdapat 2.419 keluarga miskin di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung. Berdasarkan hasil peninjauan awal, diketahui bahwa Cigending dijadikan sebagai kelurahan percontohan dari lima kelurahan yang ada di Ujung Berung dalam hal kegiatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan di sana masih tetap ada, upaya dan inisiatif yang telah dilakukan di Kelurahan Cigending menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini.

Kelurahan Cigending menonjol dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai kelurahan percontohan, Cigending telah menjadi model bagi kelurahan lain di Ujung Berung dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan sendiri telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal untuk jangka pendek harus meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dengan pendekatan kemanusiaan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan yang mencakup peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan sosial dan perlindungan. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang paling mendesak dan membantu individu mencapai kemandirian melalui kegiatan ekonomi.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dirancang pemerintah yang mendukung pemberdayaan usaha ekonomi di tingkat lokal adalah program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dijalankan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang juga dijalankan oleh PKK Kelurahan Cigending. Tujuan dari program UP2K adalah meningkatkan pendapatan dengan membentuk kelompok usaha ekonomi produktif, baik dalam bentuk usaha individu maupun kelompok.

Banyak penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa program UP2K memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah penelitian Ulfa Nabila dkk (2023) melalui metode *field research* yang mengungkapkan bahwa program UP2K-PKK di Nagari Kubang Putihah dilihat dari mekanisme kegiatan dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga walaupun masih terdapat kendala dalam segi waktu pelaksanaan. Penelitian serupa yang dilakukan Glori Christin dkk (2023) juga mengungkapkan bahwa kelompok UP2K Wanita

Tani Suka Maju Desa Ajaobaki berperan baik terhadap kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha dalam mencapai kesejahteraan. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menggambarkan adanya dampak positif dan manfaat yang dirasakan masyarakat sasaran dari program UP2K serta pentingnya program UP2K sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Pelaksanaan UP2K memang memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan pendapatan keluarga, namun fakta di lapangan dari beberapa penelitian lain seperti penelitian Mariatul dkk (2022) mengungkapkan masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan UP2K, diantaranya sarana prasana yang kurang mendukung, penggunaan teknologi yang rendah, waktu yang kurang efisien, sumber modal yang terbatas serta kualitas kader yang kurang mumpuni. Para penelitian sebelumnya menyarankan perlunya melakukan penelitian mendalam terhadap pelaksanaan program UP2K di berbagai wilayah dengan memanfaatkan metode dan teori yang lebih luas. Hal ini dikarenakan strategi implementasi UP2K dapat bervariasi di setiap wilayah, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih luas dan kontekstual untuk memahami tantangan pelaksanaan UP2K di setiap wilayah.

Berdasarkan gagasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Cigending guna menggali lebih dalam mengenai implementasi program UP2K sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung” yang dijabarkan dalam sub-sub pertanyaan berikut.

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana standar dan sasaran program yang ditetapkan dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending?
3. Bagaimana alokasi sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending?
4. Bagaimana hubungan antarorganisasi atau kemitraan dalam pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending?
5. Bagaimana karakteristik dan sikap agen pelaksana dalam program UP2K di Kelurahan Cigending?
6. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung dan berdampak dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang:

1. Karakteristik informan
2. Standar dan sasaran pelaksanaan program UP2K
3. Alokasi sumberdaya program UP2K

4. Hubungan antarorganisasi atau kemitraan program UP2K
5. Karakteristik dan sikap agen pelaksana program UP2K
6. Kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi program UP2K

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pekerjaan sosial, khususnya praktik pekerjaan sosial dalam penanganan kemiskinan melalui program UP2K.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya menjadi acuan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait isu yang serupa mengenai implementasi program UP2K serta memberikan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan terkait penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan program UP2K di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam laporan ini terbagi menjadi bagian awal dan bagian utama dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman daftar isi.
2. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Meliputi hasil telaah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Serta landasan teori mengenai pembahasan dari topik yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data, cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang simpulan hasil penelitian berupa temuan dan saran, baik saran guna laksana maupun saran peneliti lanjutan.

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti diambil dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ilmu sosial dan pembangunan manusia dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Mariatul dan Wati Nilamsari 2022. Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol 3 (1).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Fokus pertanyaan penelitian ini adalah mengenai proses pemberdayaan perempuan melalui program UP2K dan efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut terhadap komunitas di RW 01 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. dengan jumlah 8 informan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi pandemi Covid-19, proses pemberdayaan melalui program UP2K di RW 01 tetap berjalan. Pelaksanaan program dilakukan dengan mendukung kegiatan usaha di rumah, yang memungkinkan anggota perempuan UP2K untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Dampak dari program UP2K meliputi perubahan signifikan seperti peningkatan pendapatan, pengetahuan, dan jaringan sosial bagi anggota yang terlibat dalam kegiatan UP2K.

2. Christin dkk, 2023. Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Terhadap Kesejahteraan Anggota Wanita Tani Suka Maju Desa Ajaobaki. *Jurnal of Comprehensive Science*, Vol 2 (10).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok UP2K Wanita Tani Suka Maju Desa Ajaobaki Terhadap Kesejahteraan Anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara terstruktur kepada informan Kepala Desa Ajaobaki, Ketua PKK, Ketua Kelompok UP2K Wanita Tani Suka Maju, Anggota Kelompok UP2K Wanita Suka Maju dan Keluarga dari Anggota Kelompok UP2K Wanita Suka Maju Desa Ajaobaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok UP2K Wanita Tani Suka Maju Desa Ajaobaki berperan baik terhadap kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha dalam mencapai kesejahteraan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan konsumsi/pengeluaran. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu penggunaan alat yang masih manual, kemasan produk yang masih biasa, pemasaran, dan jasa pengiriman yang mahal.

3. Rahmita Budiartiningsih, Reni Gusfrianti, 2023. Peranan Program UP2K Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, Vol 18 (4).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan UP2K dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun data yang digunakan dalam adalah data primer dan data sekunder, dengan sampel 65 responden penerima bantuan dana bergulir UP2K yang juga merupakan populasi. Data primer adalah data

yang diperoleh dari responden secara langsung, yaitu kelompok UP2K yang menerima bantuan dana bergulir tahun 2007, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya, sesuai dengan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa χ^2 hitung (23,290) lebih besar dari χ^2 tabel (3,841) ini berarti adanya perkembangan dan peningkatan pendapatan keluarga setelah adanya Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

4. Ulfa Nabila dkk, 2023. Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3 (2).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Penelitian ini bersifat lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan sembilan informan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UP2K-PKK di Nagari Kubang Putih dinilai efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga, terlihat dari mekanisme kegiatan dan indikator efektivitasnya. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan pada

indikator ketepatan waktu yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberhasilan program ini secara keseluruhan.

Berdasarkan penjabaran empat penelitian terdahulu di atas, perbedaan dan kebaharuan penelitian yang dilakukan saat ini dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Mariatul dan Wati Nilamsari	Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19	Pendekatan kualitatif dengan metode <i>field research</i> , teknik yang digunakan wawancara dan obserasi kepada 7 informan dengan fokus aspek yang diteliti yakni proses pemberdayaan perempuan	a. Subjek Penelitian b. Metode pendekatan c. Lokasi Penelitian
2	Christin dkk	Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Terhadap Kesejahteraan Anggota Wanita Tani Suka Maju Desa Ajaobaki	Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terstuktur kepada 6 informan dan berfokus pada peran UP2K sebagai aspek yang diteliti	a. Subjek Penelitian b. Lokasi Penelitian
3	Rahmita Budiartiningsih, Reni Gusfrianti	Peranan Program UP2K Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Cerenti Kabupaten	Pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan teknik quisioner dan wawancara dengan aspek pengaruh peranan	a. Subjek Penelitian b. Lokasi Penelitian

		Kuantan Singingi	UP2K sebagai aspek yang diteliti	
4	Ulfa Nabila dkk	Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan obserasi kepada 9 informan yang berfokus pada mekanisme dan efektivitas proram sebagai aspek yang diteliti	a. Subjek Penelitian b. Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dari tabel di atas, perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian terkini lebih menitikberatkan pada analisis mendalam dan terperinci terkait implementasi atau pelaksanaan kegiatan dari program UP2K dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian saat ini adalah untuk mengungkapkan secara menyeluruh kedalaman program UP2K dengan meneliti aspek yang berbeda yang sebelumnya belum teridentifikasi di penelitian-penelitian lain. Maka dari itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi baru dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal melalui pemanfaatan program UP2K itu sendiri.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

Menurut Webster's Dictionary (1979) seperti yang dikutip oleh Tachjan (2006), implementasi berasal dari kata kerja "*to implement*" yang berasal dari

bahasa Latin *implementum*, yang berasal dari kata "*impere*" dan "*plere*". "*Implere*" berarti "*to fill up; to fill in*", yang mengindikasikan mengisi penuh atau melengkapi, sementara "*plere*" berarti "*to fill*", yang berarti mengisi. Implementasi, secara etimologis, dapat diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Tachjan, 2006).

Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010) mengartikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sementara itu, menurut Lane dalam Akib (2010), implementasi dapat didefinisikan sebagai konsep yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai kesesuaian dari maksud, output, dan outcome. Dengan demikian, konsep implementasi merujuk pada proses yang meliputi tujuan, hasil sebagai produk, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Secara sederhana, implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan sebuah kebijakan administratif yang awalnya hanya berupa pernyataan umum tentang tujuan dan sasaran, serta berbagai sarana yang diperlukan, menjadi program-program operasional yang konkret. Menurut Grindle (1980) dalam Tachjan (2006), program-program operasional ini haruslah jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. Mereka tidak hanya mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi juga menetapkan secara rinci alokasi sumber daya yang dibutuhkan, metode kerja yang harus digunakan, serta standar yang harus dipatuhi.

Implementasi kebijakan atau program diperlukan karena pada tahap ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dapat disesuaikan. Alasan ini sejalan dengan pendapat Korten dan Syahrir (1980) dalam Akib (2010) bahwa keberhasilan kebijakan atau program tergantung pada sejauh mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sejauh mana program tersebut sesuai dengan struktur organisasi pelaksana, dan sejauh mana kecocokan antara kebutuhan kelompok penerima manfaat dengan struktur organisasi

Dalam penjelasan Akib (2010), berhasilnya pelaksanaan kebijakan atau program juga dapat dievaluasi melalui dua perspektif, yaitu perspektif proses dan perspektif hasil. Dari segi proses, keberhasilan program pemerintah tergantung pada sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat program, termasuk tata cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sementara itu, dari segi hasil, keberhasilan program dinilai berdasarkan dampak yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun suatu program dapat dianggap berhasil dari segi proses, namun mungkin gagal jika dampak yang dihasilkan tidak sesuai harapan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, kesuksesan implementasi kebijakan dapat diukur melalui konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Menurut Kasmad (2013), studi implementasi adalah upaya untuk mengeksplorasi atau menjawab berbagai pertanyaan yang timbul mengenai bagaimana kebijakan nasional yang sama dapat diimplementasikan dengan hasil yang bervariasi di berbagai pemerintahan daerah, mengapa beberapa berhasil dan

beberapa tidak, dan yang berhasil memiliki tingkat variasi yang berbeda. Studi ini juga mencari alasan mengapa jenis kebijakan tertentu lebih cenderung sukses daripada kebijakan lainnya. Peter de Leon (2011) mengidentifikasi pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang dibagi menjadi tiga generasi yakni generasi pertama, kedua, dan ketiga. Setiap generasi memiliki tantangan dan kontribusi tersendiri dalam upaya memahami fenomena implementasi ini.

1. Generasi Pertama (1970-an) Generasi menggunakan Studi Kasus.

Pada generasi pertama, mereka memandang implementasi kebijakan sebagai permasalahan yang terjadi antara kebijakan dan pelaksanaannya. Generasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebingungan para ahli terhadap realitas yang mereka hadapi dalam praktik kebijakan publik. Akademisi atau ilmuwan administrasi publik memahami bahwa kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk menyelesaikan masalah publik, terutama ketika mekanisme pasar gagal melakukannya.

Namun, secara teoritis, alat yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah publik tidak selalu mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan di lapangan. Implementasi kebijakan seringkali menimbulkan kekhawatiran karena menciptakan jurang yang lebar antara gagasan awal dan kondisi ideal yang diharapkan saat kebijakan dirumuskan. Hal ini terjadi karena perspektif para ahli dalam memahami kebijakan publik.

Wilson (1887) dalam Kasmad (2013) menyampaikan ide kepada pendukung pandangan dikotomi politik-administrasi, yang berpendapat bahwa bagian paling sulit dari siklus kebijakan publik adalah tahap politik (penyusunan agenda,

formulasi, dan legitimasi). Sementara itu, tahap implementasi dianggap mudah karena dianggap hanya sebagai kegiatan administrasi. Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa banyak program pemerintah gagal dalam tahap implementasi. Kegagalan ini mendorong Pressman dan Wildavsky untuk melakukan kajian tentang implementasi, yang kemudian diikuti oleh ilmuwan lain yang tertarik dengan bidang ini.

Pendekatan generasi pertama terbatas pada studi kasus dengan metode deskriptif yang melakukan investigasi mendalam terhadap implementasi kebijakan publik di lokasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami mengapa implementasi kebijakan tersebut gagal. Dari berbagai studi ini, muncul istilah *missing link* yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan pemerintah dalam mengubah niat baik menjadi kebijakan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menghasilkan kebijakan yang baik (P. delon dalam Kasmad, 2013). Secara sederhana, niat baik pemerintah tidak akan menghasilkan hasil positif jika mereka tidak mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan program dengan baik.

Dengan pendekatan studi kasus, generasi pertama menghasilkan banyak laporan tentang kegagalan implementasi. Mereka menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kebijakan yang diteliti secara mendalam, rinci, dan penuh ilustrasi, membuat hasil penelitian mereka menarik untuk dibaca. Setelah mendeskripsikan kegagalan implementasi dan mengidentifikasi penyebabnya, para peneliti memberikan solusi masing-masing tentang cara mengatasi masalah implementasi kebijakan. Namun, solusi ini belum mampu menghasilkan teori

umum tentang implementasi, yaitu penjelasan hubungan sebab-akibat tentang kegagalan atau keberhasilan implementasi yang bisa diterapkan di mana saja. Sebagai studi kasus, hasil penelitian generasi pertama memiliki keterbatasan, di mana proposisi yang dihasilkan hanya berlaku di lokasi studi kasus tersebut.

Meskipun generasi pertama memiliki kelemahan, kerja akademik mereka menjadi fondasi penting bagi generasi-generasi berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan/program.

2. Generasi kedua (1980-an), Generasi yang Membangun Model.

Generasi kedua mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan dari perspektif atas ke bawah (*top-down*), yang berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Generasi ini banyak membangun teori dan model implementasi untuk diuji di lapangan, berkat kontribusi para peneliti dari generasi pertama. Studi implementasi generasi kedua lebih kompleks dan menggunakan metode ilmiah yang ketat. Peneliti generasi kedua menggunakan hipotesis tentang model implementasi yang ideal dan mengujinya dengan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Mereka cenderung menggunakan metode positivistik dengan data kuantitatif.

Dalam menjelaskan masalah implementasi, generasi kedua terbagi menjadi dua pendekatan yakni *Top-Down* dan *Bottom-Up* menurut Hogwood and Gunn dalam Kasmad (2013).

1) Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan ini menggunakan logika dari atas ke bawah untuk memetakan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Peneliti memulai

dengan keputusan kebijakan dan memeriksa sejauh mana tujuan yang ditetapkan tercapai dan mengapa. Pendekatan ini juga disebut "*policy centered*" karena fokus pada kebijakan dan mencari fakta apakah kebijakan tersebut mencapai tujuannya saat diimplementasikan.

Beberapa ahli yang menggunakan pendekatan ini adalah Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980), dan Grindle (1980). Mereka bekerja dengan cara memahami kebijakan dan menilai pencapaian tujuannya di lapangan, sering disebut pendekatan "*command and control*" yang berarti memberikan perintah dan mengawasi pelaksanaannya.

Barrett (2004) dalam Kasmad (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama pendekatan *top-down* adalah "mengidentifikasi penyebab masalah implementasi atau kegagalan dan menyarankan cara untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan," yang melibatkan strategi komunikasi yang lebih baik, koordinasi, manajemen sumber daya, dan pengendalian agen pelaksana. Pendekatan ini sering disebut pesimistis karena fokusnya pada kegagalan implementasi.

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah dari atasan kepada bawahan dan bagaimana atasan mengawasi pelaksanaan perintah tersebut. Kejelasan perintah ini terkait dengan pendefinisian tujuan kebijakan, yang diinterpretasikan oleh atasan sebagai instruksi kerja. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan atasan mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut. Peneliti seperti Van Meter dan Van Horn (1975) mencoba membuat model

implementasi ideal dengan pendekatan *top-down*. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Kasmad (2013) menyusun model komprehensif yang mensintesis sekitar 17 variabel dari penelitian sebelumnya.

Variabel-variabel tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis: *Tractability of the problem*: Tingkat kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Semakin sulit masalah, semakin kecil peluang keberhasilan implementasi. *Ability of statute to structure implementation*: Kemampuan kebijakan merespons masalah. Semakin jelas tujuan dan dukungan sumber daya, semakin besar peluang keberhasilan implementasi. *Non-statutory variables*: Variabel konteks atau lingkungan kebijakan. Semakin baik dukungan lingkungan, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

2) Pendekatan *Bottom-up*

Para peneliti dari generasi kedua yang menggunakan pendekatan *top-down* telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang implementasi kebijakan. Namun, beberapa di antara mereka merasa kurang puas dengan pendekatan ini karena dianggap terlalu memudahkan masalah dan terlalu terfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa realitas implementasi kebijakan jauh lebih kompleks dan tidak hanya terkait dengan efektivitas atau efisiensi semata.

Sabatier (1984) dalam Kasmad (2013) mencatat empat kritik utama terhadap pendekatan *top-down* oleh para peneliti implementasi seperti Hjern dan Hull (1982), Barrett dan Fudge (1981), serta Elmore (1979), yang menjelaskan

bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam memahami dinamika yang lebih luas dari implementasi kebijakan.

3. Generasi ketiga (1990-an) dikembangkan oleh Malocom L.Gogging.

Pada dekade 1990-an, generasi ketiga penelitian implementasi kebijakan dikembangkan oleh Malcom L. Goggin. Generasi ini menekankan bahwa perilaku aktor pelaksana lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan kontinjensi (situasional) lahir pada masa ini, berargumen bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kondisi spesifik setiap kebijakan.

Generasi ketiga disebut sebagai generasi pembaharu karena mereka berusaha menerapkan metodologi yang lebih kuat sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Mereka melanjutkan pendekatan bottom-up dari generasi sebelumnya, namun juga berupaya mengembangkan studi implementasi ke arah yang lebih ilmiah (Kasmad, 2013). Menurut Goggin et al. (1990) untuk meningkatkan kualitas penelitian implementasi, peneliti perlu:

- 1) Memperjelas konsep-konsep yang digunakan, terutama konsep implementasi.
- 2) Memperbanyak kasus yang akan diteliti untuk memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai fenomena implementasi.
- 3) Membangun model dan indikator untuk menguji hipotesis.
- 4) Berani memperbaiki penggunaan konsep dan pengukuran yang dihadapi oleh peneliti sebelumnya.

Hal yang membedakan generasi ketiga dari pendahulunya adalah dorongan untuk mengadopsi penelitian kuantitatif dengan meningkatkan kualitas indikator pengukuran, baik untuk variabel dependen (kinerja implementasi) maupun variabel prediktor (faktor-faktor yang menjelaskan kinerja implementasi).

Meskipun minat terhadap studi implementasi kebijakan meningkat, banyak yang masih belum memahami prosesnya dengan baik, yang berdampak negatif pada dua hal. Pertama, kurangnya pemahaman ini menghambat upaya memahami proses kebijakan secara keseluruhan. Kedua, kondisi ini membuka peluang untuk memberikan saran yang kurang tepat kepada pembuat kebijakan (Kasmad, 2013).

Levine dalam Kasmad (2013) menyimpulkan bahwa kesulitan dalam kebijakan perang melawan kemiskinan seringkali tidak berasal dari sifat program itu sendiri, tetapi dari kesenjangan antara maksud kebijakan dan pelaksanaannya. Ada beberapa alasan mengapa studi implementasi kebijakan sering diabaikan

- 1) Asumsi Naif: Banyak yang berasumsi bahwa setelah kebijakan dibuat, implementasinya akan berjalan sesuai rencana.
- 2) Fokus pada Pembuat Keputusan: Pada tahun 1960-an, penyusunan program dan perencanaan hanya fokus pada pilihan metode untuk mencapai tujuan, mengabaikan peran pelaksana.
- 3) Kesulitan Metodologis: Kompleksitas proses implementasi membuatnya sulit untuk diteliti secara rinci, karena memerlukan banyak variabel yang sulit diukur.

Gagasan peneliti generasi ketiga menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat cenderung gagal saat diimplementasikan

oleh pemerintah daerah. Hal ini sering terlihat dalam kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dengan baik tetapi tidak berhasil di lapangan. Misalnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan sering gagal diimplementasikan secara efektif karena berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran (Kasmad, 2013).

Berdasarkan ulasan dari berbagai ahli mengenai teori implementasi dari generasi pertama hingga ketiga, penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang merupakan pandangan kunci dari generasi kedua peneliti implementasi. Teori ini menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Teori Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Kasmad (2013) memberikan kerangka analisis yang mencakup berbagai variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program. Hal ini termasuk tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik dan sikap agen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi.

Salah satu kelebihan teori generasi kedua, termasuk Van Meter dan Van Horn, adalah pengakuannya terhadap kompleksitas implementasi program. Mereka tidak hanya melihat program sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dan konteks (Kasmad, 2013). Hal ini membantu peneliti memahami dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaksana program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending sebagai lokasi penelitian saat ini.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Kasmad (2013) ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi suatu program, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antarorganisasi kemitraan (4) karakteristik dan sikap agen pelaksana dan (5) kondisi sosial dan ekonomi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan atau program perlu dukungan Sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*nonhuman resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
3. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik dan sikap agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan,

sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2.2.2 Tinjauan Tentang Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan bagian dari program pokok Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang dibagi ke dalam empat Kelompok Kerja (Pokja) dan UP2K masuk ke dalam bagian program pokja dua. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK diakui sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan, berfungsi sebagai mitra bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah Desa dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan tujuan menciptakan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis. PKK juga berperan dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, perannya sebagai penggali dan pengembang potensi masyarakat, terutama dalam konteks keluarga, sebagai pembina, motivator, serta sebagai pendorong inisiatif gotong royong dan swadaya perempuan, menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif.

UP2K adalah segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Program ini umumnya diarahkan kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah atau rentan terhadap kemiskinan. Sesuai amanat Permendagri No 36 Tahun 2020 yang dikutip dalam Nurmasari, dkk (2023) Tujuan umum dari Program UP2K ini adalah membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswata dan memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat koperatif. Sementara tujuan khusus dari program UP2K diantaranya:

1. Membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah untuk menumbuhkan kewiraswataan
2. Membantu pengembangan usaha bagi usaha yang membutuhkan penambahan modal
3. Membantu modal usaha untuk usaha perkreditan guna memenuhi kebutuhan modal dan mengurangi ketergantungan dari para pelepas uang
4. Menumbuh kembangkan kegiatan usaha yang bersifat komperatif

Prinsip manajemen usaha yang dikelola oleh kelompok UP2K adalah sebagai berikut

1. Setiap kelompok terdiri dari minimal 5 keluarga, setiap keluarga diwakili oleh satu orangorang.
2. Syarat menjadi anggota kelompok adalah keluarga yang mau berusaha maupun yang sudah memiliki usaha mikro dan kecil.

3. Satu kelompok terdiri dari seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota.
4. Susunan kepengurusan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan.yaitu.
5. Pembentukan kelompok harus disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan

Tahapan pengembangan usaha dalam program UP2K meliputi tiga tahapan kelompok sesuai dengan kelengkapannya yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kelompok UP2K Pemula

Kelompok UP2K Pemula baru dibentuk dengan kepengurusan yang belum lengkap dan administrasi yang belum tersusun rapi. Produksi barang atau jasa masih sederhana, baik dari segi kualitas maupun kemasan, dan pemasaran hanya mencakup lingkungan sekitar rumah kelompok. Skor klasifikasi nilai pengembangan untuk kelompok ini berkisar antara 50 hingga 600.

2. Kelompok UP2K Madya

Kelompok UP2K Madya memiliki kepengurusan yang hampir lengkap, meskipun pembagian tugas belum jelas. Admiistrasi, akuntansi, dan keuangan sudah lengkap. Produk atau jasa yang dihasilkan telah memiliki kualitas dan kemasan yang baik, dan jangkauan pemasaran sudah meluas hingga keluar lingkungan domisili kelompok. Skor klasifikasi nilai pengembangan untuk kelompok ini berada di antara 601 hingga 700.

3. Kelompok UP2K Utama

Kelompok UP2K Utama memiliki kepengurusan yang lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Administrasi serta akuntansi dan keuangan sudah lengkap. Produksi barang atau jasa mengalami peningkatan dalam hal kualitas,

kuantitas, dan kemasan. Pemasaran barang telah meluas, bahkan mencapai swalayan. Kelompok ini juga sudah menjalin usaha dengan pihak lain dan memiliki legalitas usaha, minimal izin domisili dan izin usaha. Produksi dan pelayanan jasa dilakukan secara berkelanjutan, serta kelompok mulai merintis badan hukum. Skor klasifikasi nilai pengembangan untuk kelompok ini berkisar antara 701 hingga 1200.

4. Kelompok UP2K Mandiri

Kelompok UP2K Mandiri memiliki kepengurusan yang lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Administrasi, akuntansi, dan keuangan sudah lengkap. Kelompok ini sudah melakukan transaksi melalui layanan bank, dan produksi barang atau jasa semakin berkualitas serta berkembang dalam kuantitas. Proses produksi menggunakan teknologi tepat guna, pemasaran semakin meluas, dan teknik pemasaran sudah menggunakan media. Kelompok ini juga sudah berbisnis dengan pihak lain dan memiliki legalitas usaha yang lengkap, termasuk izin domisili, izin usaha, dan amdal.

2.2.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan

2.2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan umumnya dipahami dalam konteks ekonomi sebagai kurangnya pendapatan uang dan keuntungan non-material lainnya yang diterima oleh seseorang (Suharto, 2017). Namun, kemiskinan juga sering digambarkan sebagai kondisi keterbatasan yang mencakup kurangnya akses pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, dan kurangnya sarana transportasi penting bagi masyarakat. Definisi kemiskinan yang berfokus pada aspek kebutuhan dasar ini

digunakan oleh Kementerian Sosial, khususnya dalam merumuskan konsep fakir miskin. Fakir miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kementerian Sosial menggunakan kriteria berbasis pendapatan dan aset untuk mengidentifikasi fakir miskin, dengan memperhatikan bahwa mereka memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau kurangnya kepemilikan aset yang mencukupi untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Menurut Friedman dalam Suharto (2017), secara politik, kemiskinan bisa dipahami dari seberapa besar akses terhadap kekuasaan (pengaruh). Pengaruh dalam konteks ini meliputi struktur politik yang mempengaruhi kemampuan suatu kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya. Sementara secara sosial-psikologis, kemiskinan mencerminkan kekurangan dalam jaringan dan struktur sosial yang mendukung upaya untuk meningkatkan produktivitas.

Banyak pandangan lain yang mendefinisikan kemiskinan dengan beragam diantaranya sebagai berikut.

1. Berdasarkan Bappenas (2004), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka guna menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara layak.
2. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan lainnya, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran.

3. Menurut Badrul Munir (2002), suatu negara dapat dikategorikan sebagai miskin apabila memiliki pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi yang melibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar individu atau kelompok untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun.

2.2.3.2 Batas Kemiskinan

Setiap negara menggunakan batas garis kemiskinan yang bervariasi karena perbedaan geografis dan standar hidup yang berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, misalnya, menetapkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Standar kebutuhan minimum makanan ditetapkan pada 2.100 kalori per hari, sementara pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan mencakup biaya untuk perumahan, pakaian, dan berbagai barang dan jasa lainnya.

Garis kemiskinan (GK) menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari dua bagian, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Dengan demikian, secara formulatif dapat dinyatakan bahwa $GK = GKM + GKNM$. Penghitungan garis kemiskinan

dilakukan secara terpisah untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan tersebut.

Menurut standar BPS, ketika pemerintah mencatat penurunan garis kemiskinan, Bank Dunia justru memiliki pendekatan yang berbeda. Bank Dunia menggunakan basis penghitungan yang melibatkan 40 persen penduduk Indonesia dalam kategori miskin, dengan mengacu pada paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) tahun 2017. Konsep ini memungkinkan Bank Dunia untuk menyesuaikan angka pendapatan domestik bruto (PDB) yang berbeda-beda di tiap negara. Dengan asumsi kurs Rp4.852,35 per dolar AS PPP, maka batas untuk kelas pendapatan menengah ke atas setara dengan Rp33.238,59 per kapita per hari atau Rp997.157 per bulan. Menggunakan patokan BPS bahwa rata-rata ada 4,71 orang per rumah tangga, maka rumah tangga dianggap miskin jika pendapatannya kurang dari Rp4.696.613 per bulan..

2.2.3.3 Dimensi Kemiskinan

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap miskin. Faktor penentu utama dalam kemiskinan relatif adalah perbandingan dengan lingkungan sekitarnya daripada kondisi pribadi individu. Di sisi lain, kemiskinan absolut mengacu pada kondisi di mana pendapatan atau sumber daya seseorang tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup. Konsep kemiskinan absolut ini lebih sering digunakan untuk menetapkan kriteria orang atau kelompok yang dianggap miskin. Tantangan dalam mengukur kemiskinan absolut termasuk menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, yang dipengaruhi tidak hanya oleh kebiasaan lokal tetapi juga oleh tingkat perkembangan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2000, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, kemiskinan kronis atau struktural, yang terjadi secara berkelanjutan dan disebabkan oleh kondisi sosial-budaya yang tidak mendukung produktivitas, keterbatasan sumber daya, isolasi geografis di daerah-daerah dengan sumber daya alam terbatas, serta rendahnya pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap lapangan kerja. Kedua, kemiskinan sementara, yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal ke krisis ekonomi, faktor musiman seperti dalam sektor nelayan dan pertanian pangan, serta dampak bencana alam atau kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pandangan lain dari David Cox (2004) dalam Suharto (2017) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menyebabkan polarisasi ekonomi di mana negara-negara maju umumnya menjadi pemenang, sementara negara-negara berkembang sering kali terpinggirkan akibat persaingan dan pasar bebas yang merupakan inti dari globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan terkait dengan pembangunan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kemiskinan

subsisten yang terjadi karena rendahnya tingkat pembangunan, kemiskinan pedesaan yang disebabkan oleh marginalisasi pedesaan dalam proses pembangunan, dan kemiskinan perkotaan yang muncul akibat karakteristik dan laju pertumbuhan perkotaan.

3. Kemiskinan sosial, mencakup kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas dalam masyarakat.
4. Kemiskinan konsekuensial, adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh peristiwa atau faktor eksternal di luar kendali individu miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya pertumbuhan populasi.

2.2.3.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut pandangan Suharto (2013) faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan diantaranya faktor individu, sosial, kultur, dan struktural dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Faktor individual dalam konteks kemiskinan meliputi aspek patologis seperti kondisi fisik dan psikologis individu yang berpengaruh terhadap kondisi mereka yang miskin. Kemiskinan sering kali diatribusikan pada perilaku, pilihan hidup, atau kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan.
2. Faktor sosial mencakup kondisi lingkungan sosial yang dapat mempersempit seseorang ke dalam kemiskinan. Contohnya adalah diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, atau etnis yang dapat menyebabkan seseorang terpinggirkan secara ekonomi. Faktor ini juga meliputi kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mempengaruhi kemiskinan antar generasi.

3. Faktor kultural mengacu pada kondisi atau nilai budaya yang dapat menyebabkan atau mempertahankan kemiskinan. Konsep kemiskinan kultural menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya atau subkultur tertentu yang dimiliki oleh orang miskin bisa berbeda dengan mayoritas masyarakat. Sikap-sikap negatif seperti fatalisme atau kecenderungan untuk menyerah pada nasib seringkali diidentifikasi sebagai bagian dari dampak negatif dari faktor kultural terhadap kemiskinan.
4. Faktor struktural berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak merata, tidak sensitif, dan sulit diakses yang dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu terjebak dalam kemiskinan. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal terhimpit oleh kebijakan pajak dan kondisi investasi yang lebih menguntungkan bagi golongan kaya.

Menurut Kuncoro (2004) yang dikutip oleh Pratiwi (2022), masalah kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, adanya teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*).

2.2.4 Tinjauan Tentang Praktik Pekerja Sosial dengan Kemiskinan

2.2.4.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka untuk berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat

yang mendukung tujuan tersebut (Zastrow, 2017). Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasarkan pada tiga komponen utama yang secara terpadu membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial: kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*). Ketiga komponen ini dikembangkan secara eklektik dari berbagai ilmu sosial, termasuk sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik, dan ekonomi.

Dalam Konferensi Dunia di Montreal, Kanada, pada Juli tahun 2000, *International Federation of Social Workers (IFSW)*, yang dikutip dalam Suharto (2017), mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang berfokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, perubahan sosial, pemberdayaan, pembebasan individu, serta perbaikan masyarakat. Profesi ini menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial. Pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik di mana individu berinteraksi dengan lingkungannya.

Suharto (2017) menjelaskan bahwa ilmu dan metode penyembuhan sosial dalam pekerjaan sosial dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu mikro dan makro. Pendekatan mikro berkaitan dengan keterlibatan pekerja sosial dalam menangani masalah individu, keluarga, dan kelompok. Biasanya, masalah sosial yang dihadapi melibatkan aspek psikologis, seperti stres, depresi, hambatan dalam hubungan, penyesuaian diri, kurangnya kepercayaan diri, alienasi, kesepian, keterasingan, apati, hingga gangguan mental. Dalam konteks mikro, dua metode utama yang sering digunakan oleh pekerja sosial adalah terapi perseorangan

(*casework*) dan terapi kelompok (*groupwork*), yang mencakup berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial.

Sebaliknya, pendekatan makro mencakup penggunaan metode dan teknik pekerjaan sosial untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan, seperti kemiskinan, penelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Tiga metode utama dalam pendekatan makro adalah terapi masyarakat (*community work*), manajemen pelayanan kemanusiaan (*human service management*), dan analisis kebijakan sosial (*social policy analysis*).

2.2.4.2 Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Masalah kemiskinan pada dasarnya adalah isu klasik yang telah ada sejak zaman dahulu. Sampai sekarang, belum ada rumusan atau formula yang dianggap paling efektif dan sempurna untuk mengatasi kemiskinan. Ada banyak teori yang mencoba memahami fenomena kemiskinan. Bila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menunjukkan dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo liberal dan demokrasi-sosial (Suharto, 2017).

1. Teori Neo Liberal

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan John Stuart Mill. Menurut pandangan Spicker (1995) yang dikutip oleh Suharto (2017), para pendukung neo-liberal berpendapat bahwa kemiskinan adalah masalah individual yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan pribadi. Mereka berargumen bahwa kemiskinan akan menghilang jika kekuatan pasar diperluas semaksimal mungkin dan pertumbuhan ekonomi didorong

sekuat mungkin. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya, atau lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru akan terlibat ketika lembaga-lembaga tersebut tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Penerapan program-program *structural adjustment*, seperti program jaringan pengaman sosial (*social safety net programs*) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan contoh konkret dari pengaruh *neo-liberal* dalam penanggulangan kemiskinan ini.

2. Teori Demokrasi Sosial

Teori ini didasarkan pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, para pendukung teori ini melihat bahwa kemiskinan bukanlah masalah individual, melainkan masalah struktural. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya masyarakat. Teori ini berpusat pada prinsip-prinsip *mixed economy* dan "ekonomi manajemen-permintaan" yang muncul sebagai respons terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an.

Dalam perspektif demokrasi-sosial, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan seharusnya bersifat institusional atau melembaga. Contoh dari strategi anti-kemiskinan yang diadopsi di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang mencerminkan prinsip demokrasi-sosial. Program jaminan sosial dan bantuan sosial, seperti pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, dianggap sebagai strategi yang dapat meningkatkan kebebasan karena mampu menyediakan

penghasilan dasar yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dan membuat pilihan-pilihan. Sebaliknya, ketiadaan layanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena individu kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan membuat pilihan-pilihan (Suharto, 2017).

Kesimpulannya, teori neo-liberal dan demokrasi-sosial memberikan perspektif yang berbeda mengenai kemiskinan dan peran pekerja sosial. Neo-liberal menekankan kemiskinan sebagai masalah individual yang bisa diatasi dengan perluasan pasar dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pekerja sosial berfokus pada pemberdayaan individu dan keluarga melalui keterampilan dan motivasi. Sementara itu, demokrasi-sosial melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yang memerlukan intervensi institusional, sehingga pekerja sosial berperan dalam advokasi kebijakan dan program jaminan sosial untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan. Pekerja sosial harus mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk menangani kemiskinan secara menyeluruh.

2.2.4.1 Peran Pekerja Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Sejak zaman kuno, pekerjaan sosial telah terlibat dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan. Perkembangan pekerjaan sosial dari kegiatan amal menjadi profesi tidak terlepas dari usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan. Implementasi Undang-Undang Elizabeth Poor di Inggris sebagai respons terhadap kemiskinan selama Depresi Besar pada tahun 1930-an dianggap sebagai salah satu titik penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial (Suharto, 2017). Dalam perspektif konseptual, pekerjaan sosial memandang kemiskinan sebagai

masalah yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi-sosial serta struktural dan individual.

Strategi penanggulangan kemiskinan dalam pekerjaan sosial menurut Suharto (2017) berfokus pada meningkatkan kemampuan individu miskin untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan sesuai dengan kondisinya. Karena konsep tugas-tugas kehidupan dan status bersifat dinamis dan bervariasi, intervensi pekerjaan sosial selalu mempertimbangkan bahwa individu yang menjadi sasaran perubahan, dalam hal ini orang miskin, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan situasi yang mereka hadapi. Pendekatan ini dikenal sebagai "*person-in-environment*" dan "*person-in-situation*".

Menurut teori Oscar Lewis (1966) yang dikutip dalam Marcelino (2019), pekerja sosial berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu miskin dan mengintegrasikan mereka ke dalam lapisan tengah masyarakat, terutama di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin yang besar. Namun, pandangan ini hanya mencerminkan sudut pandang konservatif tentang kemiskinan, yang menganggapnya sebagai akumulasi dari penyakit serta defisit dalam hal psikologis, moral, perilaku, dan budaya dari orang-orang miskin.

Marcelino (2019) mengemukakan bahwa pekerja sosial sebagai pemangku kepentingan dalam mengatasi kemiskinan kultural dapat meningkatkan perannya dengan cara berikut:

1. Mengubah perspektif terhadap orang miskin dan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial perlu mengembangkan kesadaran akan kemiskinan. Individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan kultural memiliki

potensi untuk mengubah mentalitas dan budaya mereka yang memiskinkan. Peran pekerja sosial adalah membantu menggali potensi tersebut melalui teknik atau pendekatan tertentu.

2. Banyak pekerja sosial terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan, seperti menjadi pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk meningkatkan efektivitas masyarakat dalam keluar dari kemiskinan, peran pendamping PKH sangat penting, terutama dalam melakukan intervensi terhadap keluarga atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh faktor-faktor kemiskinan kultural. Ini dapat mencakup pengembangan nilai-nilai budaya yang positif, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar dan kemajuan komposit, seperti yang dilakukan dalam sesi-sesi pengembangan keluarga seperti *Family Development Session* (FDS). Sebelumnya, pekerja sosial pendamping PKH perlu menjalani pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai dasar dan kemajuan komposit. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan sebagai pendidik dan fasilitator.

2.2.5 Tinjauan Tentang Praktik Pekerja Sosial dengan Komunitas

Pekerja sosial dengan komunitas merupakan salah satu metode dalam pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas mereka, serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto, 2017).

Metode pekerja sosial makro atau metode *community development/community organization* dapat digunakan untuk menangani masalah

komunitas dengan banyak model pendekatan yang tersedia. Berikut adalah model pendekatan intervensi makro, menurut Rothman dan Tropman dalam Adi (2013).

1. Model Pengembangan Masyarakat. Model ini berpendapat bahwa partisipasi dan kontribusi aktif dari masyarakat lokal adalah cara terbaik untuk mengubah atau mengembangkan suatu masyarakat.
2. Model Perencanaan Sosial. Model ini berfokus pada proses teknis dalam memecahkan masalah. Perencanaan Sosial meyakini bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya sangat kompleks dan memerlukan seorang perencana yang dapat membimbing masyarakat melalui proses perubahan yang rumit.
3. Model Aksi Sosial. Model ini mempunyai persepsi bahwa di setiap masyarakat akan ada kelompok yang tidak mampu dan perlu bantuan, dan mereka harus diorganisasikan untuk menekan struktur kekuasaan yang menindas mereka. Langkah-langkah ini diambil untuk mendapatkan sumber yang lebih baik.

Menurut Zastrow dalam Adi (2008), terdapat tujuh peran utama yang dapat dikembangkan oleh seorang pekerja komunitas antara lain sebagai berikut.

1. Pemercepat Perubahan (Enabler)

Pekerja komunitas bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat mengungkapkan kebutuhan mereka, menemukan masalah yang dihadapi, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani masalah tersebut secara efisien. Peran ini mencakup membantu masyarakat menyadari kondisi mereka, melakukan intervensi komunitas, membangun organisasi dalam masyarakat,

mengembangkan hubungan interpersonal, dan memfasilitasi perencanaan yang efektif.

2. Perantara (Broker)

Peran ini melibatkan menghubungkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dengan lembaga yang dapat menyediakan layanan tersebut.

3. Pendidik (Educator)

Pekerja komunitas diharapkan menyampaikan informasi secara efektif dan mudah dipahami, serta memiliki pemahaman yang memadai tentang topik yang dibahas. Mereka juga harus terus belajar agar tidak terjebak dalam perspektif yang tidak relevan.

4. Tenaga Ahli (Expert)

Sebagai ahli, pekerja komunitas memberikan saran dan dukungan dalam berbagai bidang. Mereka membantu masyarakat atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi yang perlu dipertimbangkan.

5. Perencana Sosial (Social Planner)

Peran ini melibatkan pengumpulan data tentang masalah sosial, analisis data, dan penyajian solusi alternatif. Mereka mengembangkan program, mencari sumber dana, dan membangun konsensus di antara kelompok.

6. Advokat (Advocate)

Berperan dalam membela kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, seringkali melalui lembaga nonpemerintah yang menuntut pemerintah untuk

memenuhi hak-hak masyarakat, seperti biaya pendidikan atau ganti rugi yang memadai bagi mereka yang digusur.

7. Aktivis

Seorang aktivis mencoba melakukan perubahan institusional yang mendasar, sering kali dengan tujuan mengalihkan sumber daya atau kekuasaan kepada kelompok yang kurang beruntung.

Menurut Brager (1987) dan Holloway (1978) dalam Adi (2013), terdapat tiga jenis teknik dalam metoda COCD sebagai berikut.

1. Kolaborasi (Kerjasama)

Kolaborasi dilakukan ketika sistem sarannya setuju dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan sumber daya. Terdapat dua jenis teknik kolaborasi yakni

- 1) Implementasi: Digunakan saat sistem kegiatan dan sistem sasaran bekerja sama dalam kesepakatan tentang perubahan yang diinginkan serta adanya dukungan pengambil keputusan mengenai alokasi dana yang dibutuhkan.
- 2) Membangun Kapasitas (*Capacity Building*): Dilakukan melalui partisipasi, yaitu melibatkan anggota sistem klien dalam usaha perubahan.

- ##### 2. Kampanye (Penyuluhan Sosial):
- Teknik ini digunakan ketika target sistem tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan sistem kegiatan, atau kesepakatan mengenai perlunya perubahan belum tercapai, atau sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak ada sumber daya untuk perubahan tersebut. Teknik kampanye terdiri dari:

- 1) Teknik Pendidikan: Melibatkan interaksi antara sistem perubahan dan sistem sasaran dengan menyajikan berbagai persepsi, sikap, opini, data, dan informasi tentang perubahan yang diinginkan, dengan tujuan meyakinkan sistem sasaran untuk mengubah cara berpikir atau bertindak.
- 2) Teknik Persuasi: Melibatkan seni meyakinkan orang lain untuk menerima dan mendukung pandangan atau persepsi mengenai suatu masalah. Terdapat beberapa metode dalam teknik persuasi:
 - 3) Kooptasi: Meminimalkan penolakan dengan melibatkan anggota sistem sasaran ke dalam sistem kegiatan."
 - 4) Lobi: Bentuk persuasi yang bertujuan mengubah kebijakan melalui kegiatan yang diarahkan pada elit pembuat kebijakan.
 - 5) Penggunaan Media Massa: Mengembangkan cerita-cerita bernuansa berita untuk media elektronik dan cetak guna mempengaruhi pendapat umum dan mendesak pengambil keputusan menyepakati cara-cara memecahkan masalah.
3. Kontes: Teknik ini digunakan ketika sistem sasaran tidak setuju dengan perubahan atau alokasi sumber daya, namun masih terbuka untuk komunikasi mengenai ketidaksepakatan tersebut. Kegiatan dalam kategori ini meliputi:
 - 1) Tawar-menawar dan Negosiasi: Proses dialog antara pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan.
 - 2) Aksi Masyarakat (*Social Action*): Tindakan kolektif yang diambil oleh masyarakat untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, menurut Sugiyono (2017), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji situasi alami dari obyek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yakni menggunakan metode deskriptif. Menurut Moleong (2016) Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan data berupa kata - kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian jenis deskriptif yang dikumpulkan berkemungkinan merupakan kunci terhadap hasil yang telah diteliti.

3.2 Penjelasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. Implementasi: Tindakan-tindakan, usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K): Program yang mewadahi segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga baik secara perorangan maupun kelompok yang dibina oleh kader UP2K PKK.
3. Kelurahan Cigending: Kelurahan di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang menjalankan program UP2K.

3.3 Penjelasan Latar Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan latar terbuka dan latar tertutup sebagaimana diuraikan oleh Lofland dalam Moleong (2022:137). Latar terbuka dalam penelitian ini mencakup tempat-tempat untuk mengamati kegiatan UP2K seperti kantor kelurahan, tempat produksi produk-produk UP2K, aula pertemuan kelompok, dimana peneliti mengandalkan pengamatan langsung, mengamati aktivitas dan interaksi kader dalam pelaksanaan UP2K. Sementara latar tertutup melibatkan ruang yang nyaman untuk melakukan wawancara dengan fokus pada pemahaman yang lebih mendalam terkait serangkaian pelaksanaan program UP2K seperti rumah warga, dan ruang sekretariat PKK. Situasi ini memerlukan hubungan yang lebih akrab, karena latar tertutup menekankan pada observasi yang lebih teliti dan wawancara yang mendalam dengan informan.

3.4 Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer yang didapatkan dengan cara pengumpulan langsung dari wawancara langsung kepada informan kunci yakni kader PKK, kelompok masyarakat yang mengikuti program UP2K dan perangkat kelurahan yang memiliki wewenang mengawasi kegiatan UP2K di Kelurahan Cigending.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari file laporan profil kelompok UP2K, laporan kegiatan, laporan dana atau laporan keuangan masing-masing anggota dan laporan lain yang relevan dengan pelaksanaan UP2K.

3.4.2 Cara Menentukan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pemilihan informan menggunakan *purposive* seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017: 85), *purposive* merujuk pada penentuan informan berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menetapkan informan yang relevan, dengan harapan dapat menghasilkan data yang valid. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Pengurus PKK yang mengelola kelompok dan kegiatan UP2K
2. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok UP2K dan aktif mengikuti kegiatan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengurus PKK

3. Perangkat kelurahan yang memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan kegiatan PKK

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, berikut teknik-teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

1. Wawancara Mendalam

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dengan jenis *indepth interview* (wawancara mendalam), yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung melakukan pertukaran informasi secara tatap muka, melalui sejumlah pertanyaan terbuka kepada semua informan sampai jenuh, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan kunci untuk mengetahui secara rinci pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending.

2. Observasi Partisipatif

Dalam konteks penelitian ini, data pendukung diperoleh melalui penerapan teknik observasi. Dalam hal ini, peneliti terlibat langsung untuk mengamati dengan mengikuti kegiatan pertemuan dan pemberdayaan kelompok UP2K di Kelurahan Cigending. Dengan metode deskriptif yang digunakan, teknik observasi ini juga digunakan untuk melihat secara langsung kondisi informan kunci yang dijadikan subjek penelitian ini. Kehidupan informan diteliti, dicatat, dan dianalisa sejauh mana pelaksanaan program

berjalan dan bagaimana hasil program terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga sasaran.

3. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data studi dokumentasi ini melibatkan pemanfaatan informasi yang diambil dari berbagai jenis dokumen, tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar yang dihasilkan oleh individu. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah foto-foto kegiatan pelaksanaan, dan berbagai laporan kegiatan program UP2K.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada uji kredibilitas data yang bersumber pada teori Sugiyono (2017). Cara pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merujuk pada kemampuan untuk mengidentifikasi dengan teliti ciri-ciri dan elemen-elemen yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta fokus secara mendalam pada hal-hal tersebut. Dengan kata lain, peneliti melakukan pengamatan yang lebih mendetail, terperinci, dan berkelanjutan terhadap kondisi nyata penerima program UP2K.

2. Kecukupan Referensi

Penelitian ini didukung oleh kecukupan referensi sebagai pendukung dalam proses penyusunan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara, sebagai cara untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

3. Triangulasi Data

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang ada. Dengan melakukan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari berbagai teknik dan sumber, tetapi juga menguji kredibilitas data dengan cara ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam hal teknik pengumpulan data, sumber data, serta rentang waktu pengumpulan data.

- 1) Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- 2) Triangulasi sumber, berarti peneliti menganalisis keabsahan data dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, baik kepada informan sasaran langsung maupun kepada lingkungannya yang terlibat dalam isu yang diteliti.
- 3) Triangulasi waktu, berarti peneliti menganalisis keabsahan data dengan teknik yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda yang dalam hal ini peneliti melakukan pada hari yang berbeda.

3.7 Teknik Analisa Data

Peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang terkumpul dari berbagai sumber. Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Miles &

Huberman dalam buku Sugiyono (2017). Kegiatan analisis data ini meliputi tahapan-tahapan berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data mentah yang dikumpulkan dari lapangan. Setelah pengumpulan data selesai, proses reduksi data melibatkan pemilihan dan pengelompokan data yang relevan untuk mempermudah tahap selanjutnya dalam menganalisis dan menampilkan data. Dalam tahap ini, peneliti memilih data yang diperlukan dari setiap informan dan menghapus yang tidak relevan, sehingga hasilnya lebih sederhana dan mendukung proses penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data (Kategorisasi)

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering dilakukan melalui teks naratif. Data disajikan dalam bentuk matriks untuk menggambarkan temuan-temuan dari data yang telah dikumpulkan serta asal usul data tersebut.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merujuk pada proses memaknai data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diambil tidak bersifat final, karena peneliti dapat kembali melakukan penelitian untuk memperdalam pemahaman. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan bukti yang kuat yang diperoleh selama penelitian lapangan, yang mampu menjelaskan keseluruhan konteks yang terkait.

3.8 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pembagian tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pra Lapangan

- 1) Penjajakan
- 2) Pengajuan judul penelitian
- 3) Bimbingan penyusunan proposal penelitian
- 4) Penyusunan proposal
- 5) Seminar proposal penelitian
- 6) Bimbingan perbaikan proposal dan penyusunan instrumen penelitian

2. Tahap Lapangan

Tahap ini memuat kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data

3. Tahap Pasca Lapangan

- 1) Bimbingan penulisan skripsi
- 2) Ujian skripsi

Langkah-langkah penelitian tersebut digambarkan ke dalam bentuk matriks.

Matriks 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2024					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul
1	Penjajakan						
2.	Pengajuan Judul Penelitian						
3.	Bimbingan Penyusunan						

	Proposal						
4.	Penyusunan Proposal						
5.	Seminar Proposal						
6.	Perbaikan Proposal dan Penyusunan Instrumen						
7.	Pengumpulan dan Pengolahan Data						
8.	Bimbingan Hasil Penelitian dan Penyusunan Laporan						
9.	Ujian Skripsi						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Cigending

Sejarah Kelurahan Cigending dimulai dengan pembangunan Grote postweg oedjoengberong oleh Pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Deandels pada tahun 1810-an. Pembangunan ini mencakup pembuatan ruas jalan raya Ujungberung yang termasuk mendirikan loji di Kampung Cigending, yang merupakan pos pengawas strategis di Alun-Alun Ujungberung saat ini. Kampung Cigending, yang dulunya dikenal sebagai kota lama Ujungberung, kemudian berkembang menjadi pusat permukiman dan perdagangan, yang menjadi salah satu pusat keramaian di Kota Bandung Timur seperti saat ini.

Pada awalnya, Kampung Cigending termasuk dalam wilayah Desa Pakemitan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung. Pada tahun 1982, Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung membagi wilayah tersebut menjadi Desa Ujungberung Utara (yang kemudian menjadi cikal bakal Kelurahan Cigending saat ini) dan Desa Ujungberung Selatan (yang sekarang termasuk dalam Kecamatan Cinambo). Pada tahun 1987, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kodya Dati II Bandung, Desa Ujungberung Utara kemudian dibagi menjadi enam desa. Tiga dari desa tersebut, saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, yaitu Desa Cigending, Desa Pasir Endah, dan Desa Pasir Wangi.

Kelurahan Cigending mengalami perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan sejak penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selama perjalanannya dalam sejarah, Kelurahan Cigending terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan berupaya sejajar dengan kelurahan lain.

Kelurahan Cigending telah melewati masa pemerintahan sejak masih menjadi desa dengan dipimpin oleh kades (kepala desa) hingga menjadi kelurahan.

Tabel 4.1 Masa Pemerintahan Desa (Kades)

No	Kepala Desa	Masa Bhakti
1	S. Djatma	1980-1983
2	D. Supardi	1983-1986
3	Machpud	1986-1990
4	Drs. Rusdi Rusyandi	1990
5	N. Syamsudin	1990
6	Anwar Hidayat	1991-1996
7	Lindu Praespanti Ananto, S.IP	1996-2001

Sumber: Studi Dokumentasi Penelitian Tahun 2024

Tabel 4.2 Masa Pemerintahan Kelurahan (Lurah)

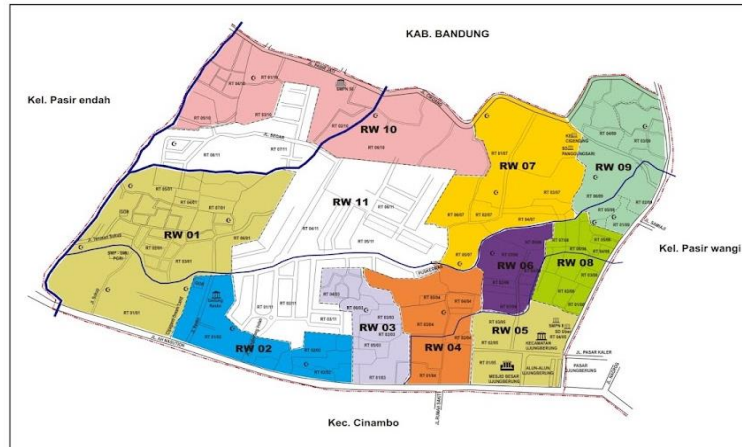
No	Lurah	Masa Bhakti
1	Drs. Kohar	2001-2004
2	Drs. Asmara Hadi, M.AP	2004-2008
3	Achmad Husein Wijaya Kusumah	2008-2009
4	Herry Hermawan, S.IP	2009-2015
5	Drs. Atang Rachman	2015-2017
6	Karna Suherman, ST.,MM	2017-2022
7	Plt. Banju Sagara, S.H	2022
8	Henni Revianti, S.AP	2022-sekarang

Sumber: Studi Dokumentasi Penelitian Tahun 2024

4.1.2 Kondisi Umum Kelurahan Cigending

Kondisi umum Kelurahan Cigending menjabarkan berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi demografi, pembagian wilayah.

4.1.2.1 Kondisi Geografis



Gambar 4.1 Peta Kelurahan Cigending
Sumber: Profil Kelurahan Cigending

Kelurahan Cigending berada di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, memiliki 66 RT (Rukun Tetangga) dan 11 RW (Rukun Warga). Secara geografis, Kecamatan Ujungberung memiliki luas wilayah sekitar 1.035,411 hektar dan terletak di ketinggian 668 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cibiru di sebelah timur, Kecamatan Arcamanik di sebelah barat dan selatan, serta Kecamatan Cilengkrang di sebelah utara.

Wilayah Kecamatan Ujungberung, termasuk Kelurahan Cigending, memiliki bentuk wilayah yang sebagian besar datar dan sedikit berombak. Ketinggian tanah di kecamatan ini mencapai sekitar 750 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar antara 19°C hingga 24°C.

4.1.2.2 Kondisi Demografi

Penduduk di Kelurahan Cigending tercatat sebanyak 25.453 jiwa terdiri dari laki-laki 8559 jiwa dan perempuan 16.894 jiwa dengan total 6.725 kepala keluarga.

Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan usia.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah
0 - 4 Tahun	1.200
5-9 Tahun	1.373
10-14 Tahun	1.490
15-19 Tahun	1.341
20-24 Tahun	1.402
25-29 Tahun	1.363
30-34 Tahun	1.216
35-39 Tahun	1.260
40-44 Tahun	1.312
45-49 Tahun	1.206
50-54 Tahun	1.090
55-59 Tahun	936
60-64 Tahun	737
65-69 Tahun	501
70-74 Tahun	274
>75 Tahun	298

Sumber: Penelitian Tahun 2024

Tabel jumlah penduduk Kelurahan Cigending di atas menunjukkan bahwa sebagian besar populasi berada dalam kelompok usia produktif, yaitu 15-49 tahun, yang merupakan potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Kelompok usia 10-14 tahun memiliki jumlah tertinggi, yang menunjukkan perlunya fokus pada pendidikan remaja. Penurunan signifikan pada kelompok usia di atas 60 tahun mengindikasikan harapan hidup yang cukup tinggi, namun juga mengisyaratkan kebutuhan layanan kesehatan yang memadai bagi lansia. Ketidakseimbangan jumlah penduduk antar kelompok usia ini menekankan

pentingnya perencanaan pembangunan yang holistik untuk mengakomodasi kebutuhan semua kelompok usia di Kelurahan Cigending.

Adapun jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Cigending sebagai berikut

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	ASN dan PNS	3.636
2	Tenaga Pengajar (Guru dan Dosen)	181
3	Wiraswasta dan Pedagang	5.094
4	Pertanian dan Perkebunan	15
5	Tenaga Kesehatan	52
6	Pensiunan	271
7	Lainnya	3.572

Sumber: Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Kelurahan Cigending menunjukkan bahwa mayoritas warga bekerja sebagai wiraswasta dan pedagang, dengan jumlah 5.094 orang. Profesi sebagai ASN dan PNS juga cukup signifikan, mencapai 3.636 orang, diikuti oleh kelompok "Lainnya" yang mencakup 3.572 orang. Meskipun terdapat banyak warga yang bekerja sebagai ASN dan PNS, serta tenaga pengajar (181 orang) dan tenaga kesehatan (52 orang), masalah kemiskinan masih tetap ada di Cigending. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmerataan pendapatan dan peluang ekonomi, serta masih adanya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan (15 orang) dengan pendapatan rendah. Selain itu, adanya 271 pensiunan juga menambah beban ekonomi bagi keluarga mereka.

Tabel 4.5 Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Ujung Berung

Wilayah Ujung Berung	Rekapitulasi Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Ujung Berung		
	2021	2022	2023
Pasanggrahan	2 089	3 058	3 005
Pasirjati	1 816	2 805	2 780
Pasirwangi	2 337	3 034	2 922
Cigending	1 798	2 518	2 419
Pasir Endah	1 339	1 942	1 895

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2023

Jumlah keluarga miskin di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, terus mengalami perubahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang disajikan dalam tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat 2.419 keluarga miskin di Cigending, sedikit menurun dari 2.518 keluarga pada tahun 2022. Meskipun terdapat banyak warga yang bekerja sebagai ASN dan PNS di Kelurahan Cigending, masalah kemiskinan masih tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan profesi dengan pendapatan tetap tidak sepenuhnya mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh seluruh warga. Penduduk dengan profesi wiraswasta dan pedagang yang lebih banyak juga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan dan mungkin akses yang tidak merata terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani kemiskinan di Kelurahan Cigending.

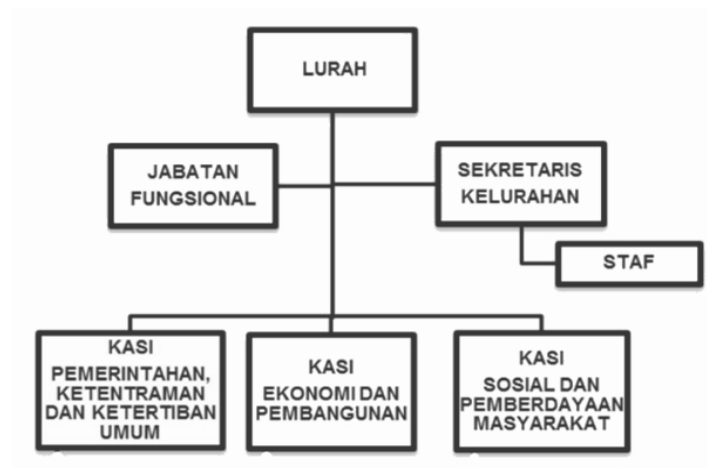
4.1.2.2 Kondisi Sosiografis

Masyarakat Kelurahan Cigending menunjukkan hubungan kerja sama yang baik antar warganya. Hal ini terlihat dari kebiasaan warga di setiap RW yang saling

membantu dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, yang mencerminkan pola hidup sehat dan baik. Kerja sama ini juga terlihat dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di masing-masing RT. Selain itu, kerja sama antar warga semakin nyata saat perayaan hari keagamaan, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana warga bersama-sama mempersiapkan acara di setiap masjid secara bergiliran, mulai dari membersihkan lingkungan masjid, hingga pembagian panitia untuk pelaksanaan acara.

4.1.3 Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Kelurahan Cigending, yang mencerminkan tata kelola administratif dan pengaturan organisasi di tingkat kelurahan, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut.



Bagan 4.1 Struktur Kelurahan Cigending
Sumber: Profil Kelurahan Cigending Tahun 2024

4.1.4 Visi dan Misi Kelurahan Cigending

Arah kebijakan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan layanan publik, partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun visi misi Kelurahan Cigending sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Kelurahan Cigending yang sejahtera, aman, dan harmonis.

2. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.
- 3) Menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program kerja kelurahan.

4.1.5 Profil PKK Kelurahan Cigending

4.1.5.1 Sejarah PKK Kelurahan Cigending

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Cigending merupakan bagian dari gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Sejarah PKK di Kelurahan Cigending tidak lepas dari perkembangan wilayah ini sejak zaman kolonial hingga menjadi bagian integral dari Kota Bandung.

Gerakan PKK dimulai pada tahun 1967 sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang berbasis di tingkat lokal. Seiring dengan perkembangan administrasi kelurahan pada awal tahun 2000-an, PKK Kelurahan Cigending mulai terbentuk dan berfungsi secara aktif sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan.

4.1.5.2 Visi dan Misi PKK Kelurahan Cigending

TP PKK Kelurahan Cigending dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki visi misi sebagai berikut.

1. Visi

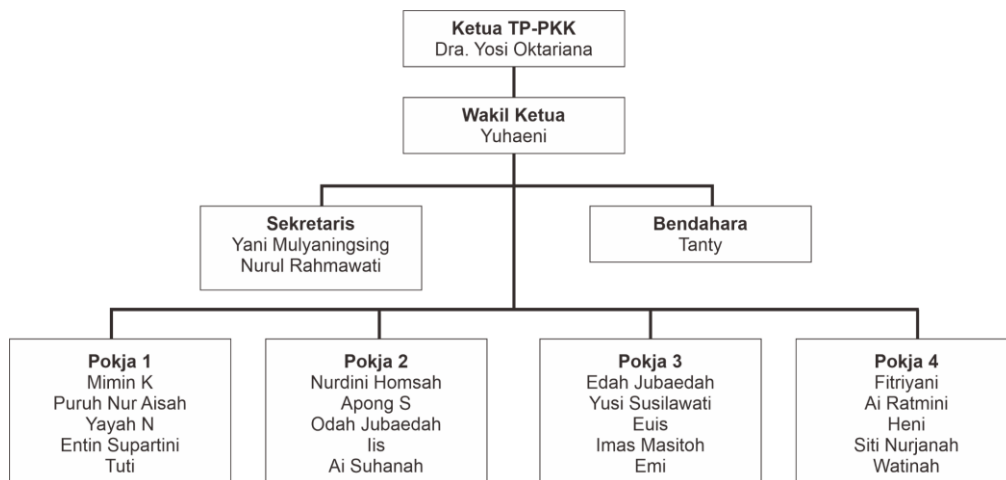
Mewujudkan keluarga yang sejahtera, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berakhlak mulia, sehat, maju, mandiri, serta kesetaraan dan keadilan gender.

2. Misi

- 1) Mengembangkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- 2) Memperkuat kehidupan beragama dan nilai-nilai spiritual dalam keluarga.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keluarga.
- 4) Memajukan pendidikan dan keterampilan keluarga.
- 5) Mengembangkan ekonomi keluarga agar lebih produktif.
- 6) Meningkatkan kesehatan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

4.1.5.3 Struktur Organisasi PKK Kelurahan Cigending

Struktur kepengurusan PKK di Kelurahan Cigending dijabarkan dalam bagan berikut.



Bagan 4.2 Struktur PKK Kelurahan Cigending

4.1.5.4 Program dan Kegiatan PKK Kelurahan Cigending

Semua pokja bekerja sama yang dibantu oleh masing-masing kadernya untuk menjalankan 10 program pokok PKK sebagai berikut.

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P3): Menggalakkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta melaksanakan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan moral dalam keluarga dan masyarakat.
2. Gotong royong: Mengadakan kerja bakti, kegiatan sosial, dan berbagai bentuk kerjasama masyarakat untuk kepentingan bersama
3. Pangan: Memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi keluarga dan mengembangkan program ketahanan pangan keluarga dan masyarakat

4. Sandang: Meningkatkan kualitas pakaian dan perlengkapan keluarga, mengadakan pelatihan menjahit, merajut, dan penggunaan bahan-bahan lokal untuk pembuatan sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga: Membangun dan memperbaiki rumah tangga yang layak huni.
6. Pendidikan dan Keterampilan: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk semua anggota keluarga serta meningkatkan keterampilan anggota keluarga untuk meningkatkan pendapatan
7. Kesehatan: Memperhatikan kesehatan anggota keluarga dan masyarakat, menggalakan hidup sehat dan bersih, mengadakan posyandu, penyuluhan kesehatan, dan program kesehatan reproduksi
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi: Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan
9. Kelestarian Lingkungan Hidup: Mengembangkan program-program pelestarian lingkungan hidup, seperti penghijauan dan pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan
10. Perencanaan Sehat: Meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera.

4.1.5.5 Capaian dan Prestasi PKK Kelurahan Cigending

Beberapa prestasi yang telah diraih oleh PKK Kelurahan Cigending antara lain sebagai berikut.

1. Juara III BKB Kemas (Bina Keluarga Balita Kesehatan Masyarakat) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2006 (atas nama BKB Melati RW.03).

2. Juara II Posyandu Tingkat Kota Bandung (atas nama. Posyandu Mawar RW.08).
3. Juara II lomba paduan suara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (KHG), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana Kesehatan (KBKES) (2005).
4. Juara III PKK Tingkat Kota Bandung (2003)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang telah dibuat sebelumnya yang terdiri dari kader UP2K, masyarakat penerima program dan perangkat kelurahan. Informasi terkait informan dijabarkan berdasarkan karakteristiknya yakni berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan dan berdasarkan kedudukan di dalam penelitian (pekerjaan/status).

4.2.1.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan tujuh informan perempuan yakni NH, TY, ET, NT, RM, TS, dan NG. Informan ini dipilih karena mereka merupakan kader PKK yang membawahi program UP2K dan keanggotaan PKK sendiri diisi oleh para perempuan.. Di Kelurahan Cigending, program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) juga mayoritas pesertanya adalah ibu rumah tangga dengan beberapa alasan. Pertama, program ini awalnya dirancang untuk memberdayakan perempuan melalui PKK dalam meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara tradisional sebagian besar perannya dipegang oleh ibu rumah tangga, namun saat

ini tidak ada batasan jenis kelamin sebagai syarat menjadi penerima manfaat program UP2K dari kalangan masyarakat. Kedua, ibu rumah tangga dianggap memiliki fleksibilitas waktu yang memungkinkan mereka untuk mengikuti program ini dan menjalankan usaha kecil dari rumah.

4.2.1.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Penelitian ini melibatkan berbagai informan dengan usia yang beragam yang dapat dilihat lebih spesifik dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Tabel Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

No	Inisial	Usia (Tahun)
1	NH	49
2	TY	35
3	ET	50
4	NT	33
5	RM	52
6	TS	42
7	NG	50

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang berusia antara 33 hingga 52 tahun. Kelompok usia ini mencakup periode kehidupan di mana banyak perempuan yang dianggap memiliki tanggung jawab besar baik dalam rumah tangga maupun dalam komunitas mereka. Informan yang lebih muda, seperti TY dan NT, sering kali masih berada dalam tahap awal karier mereka dan lebih aktif dalam mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha mandiri. Namun secara keseluruhan dalam kepengurusan PKK juga tidak ada aturan yang menjelaskan batasan usia keanggotaan TP PKK dan batasan usia penerima manfaat program UP2K. Penelitian ini juga tidak membatasi usia informan selama informan tersebut masih bagian dari anggota PKK dan masyarakat penerima program.

4.2.1.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tabel Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

No	Inisial	Pendidikan
1	NH	SMA
2	TY	SMA
3	ET	SD
4	NT	SMA
5	RM	SMA
6	TS	SMA
7	NG	S1

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa kader PKK di Kelurahan Cigending yang dijadikan informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMA. Pada umumnya, para kader mulai terlibat karena sudah aktif dalam kegiatan di RW masing-masing dan kemudian sering mengikuti kegiatan yang diadakan di Kelurahan. Tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung dalam kepengurusan TP PKK di tingkat kelurahan dari segi pendidikan, hanya diperlukan kesediaan secara lisan untuk membantu PKK di wilayah mereka.

4.2.1.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama yang mencakup kader PKK, penerima manfaat program UP2K dan perangkat Kelurahan Cigending yang dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.8 Tabel Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Inisial	Pekerjaan
1	NH	Anggota PKK
2	TY	Anggota PKK

3	ET	Anggota PKK
4	NT	Pelaku Usaha Abon Lele
5	RM	Pelaku Usaha Kue Kering
6	TS	Pelaku Usaha Gungek
7	NG	Kasi Ekbang/Perangkat Kelurahan

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Pertama, terdapat tiga kader PKK dari Pokja 2 yang bertanggung jawab atas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Kader Pokja 2 ini memainkan peran penting dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga di tingkat kelurahan. Kedua, ada tiga pelaku usaha yang merupakan penerima manfaat langsung dari program UP2K. Para pelaku usaha ini telah mendapatkan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal dari program tersebut, dan mereka diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi serta kualitas hidup keluarga mereka. Ketiga, terdapat satu pihak dari perangkat kelurahan yang bertugas mengawasi pelaksanaan program UP2K PKK yakni Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang). Peran perangkat kelurahan ini meliputi pengawasan administratif dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kombinasi informan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending.

4.2.2 Standar dan Sasaran Program UP2K

Standar adalah tolak ukur yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari suatu program. Kejelasan dan konsistensi dari standar dan sasaran

ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami apa yang harus dicapai. Standar dan sasaran dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending dijabarkan sebagai berikut.

4.2.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program UP2K

Pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending dijalankan dengan struktur di bawah binaan PKK Kecamatan Ujung Berung. Pedoman pelaksanaan disusun oleh PKK kecamatan dan diteruskan ke PKK kelurahan yang kemudian menjangkau para pelaku usaha di masyarakat, namun beberapa informan mengaku belum sepenuhnya membaca dan mengetahui pedoman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman dari kecamatan, tidak semua informan tampak familiar dengan detailnya.

Jadi kalau UP2K itu dibawah binaan UP2K kecamatan ada sih pedomannya dari kecamatan ya kayaknya cuma saya belum baca, jadi pokoknya kalau UP2K tuh dari PKK kecamatan terus PKK kelurahan terus dari kelurahan ke pelaku-pelaku usahanya. (NH)

Hal serupa terkait pedoman pelaksanaan UP2K Kelurahan Cigending juga dijelaskan oleh informan NG bahwa kepengurusan baru pada TP PKK saat ini menjadi penyebab belum terpahami dengan penuh pedoman yang ada tersebut.

Kalau peraturan sih ikut ke 10 program kerja PKK ya, ini juga kan dari kota ya jadi ada pedoman cuma saya juga baru ya, sebelum saya di kelurahan tuh UP2K udah ada gitu jadi ya memang harus di baca-baca lagi ya pedomannya

Berdasarkan hasil penelitian, program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending mulai digalakkan pada era kepemimpinan Walikota Dada Rosada, yang menjabat dari tahun 2003 hingga 2013 sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi rumah tangga oleh Tim

Penggerak PKK. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya dalam memberdayakan kaum perempuan dan mendukung ekonomi rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh informan TY, “..ini emang program pemerintah ya awalnya itu Pemerintah Kota Bandung itu ngasih modal kalau nggak salah 5 juta itu dulu sudah lama sekali itu waktu zaman Dada Rosada itu wali kotanya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader PKK, pada masa itu, Dada Rosada berfokus pada program-program yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada era kepemimpinan tersebut, sekitar tahun 2008, Pemerintah Kota Bandung menggulirkan dana sebesar Rp5 juta untuk setiap kelompok PKK di berbagai kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh anggota PKK dan masyarakat setempat. Informasi ini disampaikan oleh informan ET

Kalau waktu itu karena ibu di kader juga jadi ya anggota PKK tuh emang harus ada ya harus ada program itu pas banget waktu itu jadi zaman Pak Dada Rosada tahun 2008 itu dikasih 5 juta digulirkan ke PKK buat mengembangkan usaha, itu kebetulan waktu zaman ibu di PKK yang diperlukan untuk modal usaha.

Informan NT juga menyoroti bahwa tujuan utama dari UP2K adalah membantu perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga, terutama bagi ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi kurang.

...poin utama dari UP2K ini kan membantu perekonomian buat kesejahteraan rumah tangga intinya kan gitu kita tuh rekrut yang apa ekonominya di bawah gitu kan jadi ibu-ibu tulang punggung keluarga gitu jadi punya pekerjaan gitu.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dengan kader PKK, meskipun program UP2K telah diinisiasi sejak lama dan memiliki pedoman yang jelas, implementasi di Kelurahan Cigending masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan pengetahuan di tingkat pelaksana. Hal ini mengakibatkan adanya mispersepsi terkait standarisasi program UP2K tersebut di kalangan masyarakat seperti pernyataan informan RM, “..saya taunya itu yang pemberian modal itu ya saya juga ditawarkan teh dini katanya ini bisa pinjam ke UP2K gitu.”

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam penentuan sasaran program UP2K di Kelurahan Cigending adalah ketidaklengkapan data pelaporan dari para peserta program. Menurut informan NH, banyak laporan yang belum terdata secara komprehensif, sehingga menghambat proses evaluasi dan monitoring program. Kekurangan dalam pelaporan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran yang tepat dan mengukur keberhasilan program secara akurat.

4.2.2.2 Kriteria Sasaran Penerima Program UP2K

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UP2K di Kelurahan Cigending tidak menerapkan syarat khusus bagi calon anggotanya. Syarat utama adalah mereka yang memiliki usaha dalam bidang apapun serta mereka yang memiliki keinginan dan komitmen untuk memiliki usaha baik usaha secara individu maupun dalam bentuk kelompok seperti pernyataan informan TY.

Tidak ada persyaratan khusus, justru kita setiap tahun itu selalu mencari, selalu mencari usaha baru usaha baru gitu, usaha dari masyarakat yang mau berkembang, jadi siapapun bisa yang penting punya usaha yang sedang dijalankan atau ingin membuat usaha baru, nanti didata sama saya, sama kader yang lain setiap tahunnya.

Informan lain yakni NT menekankan bahwa usaha yang bisa bergabung tidak harus berbasis makanan, meskipun sebagian besar usaha yang terlibat adalah usaha makanan namun usaha kerajinan juga dapat diterima, “Nggak ada sih yang penting punya usaha atau niat membuat usaha gitu dan ga harus makanan sih, kerajinan gitu juga bisa cuma emang lebih banyak makanan kalo di sini”.

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh NH bahwa program UP2K terbuka untuk siapa saja yang memiliki usaha atau berencana untuk memulai usaha. Tidak ada batasan spesifik mengenai jenis usaha, selama termasuk dalam 17 sektor usaha yang diakui.

...ya intinya punya usaha yang berkaitan dengan 17 sektor usaha gitu ya bisa mengikuti 17 sektor usaha. Ya setidaknya apalah jualan kecil-kecilan juga gitu bisa, kecuali kalau yang udah sama sekali mah, Ya nggak di ini sih minimal harus punya usaha Walaupun kecil gitu ya, atau punya wacana untuk usaha gitu (NH).

Prosedur untuk bergabung menjadi anggota UP2K juga relatif sederhana, yaitu dengan menghubungi kader PKK pokja 2 untuk melakukan pendataan dengan menyertakan KTP. Informasi yang dibutuhkan dalam lembar data anggota UP2K berisi identitas diri, jenis usaha (bagi yang sudah memiliki usaha), latar belakang usaha, nama kelompok (jika usaha kelompok), seperti penjelasan informan NG.

..ya paling KTP aja sih yang tadi ya dan memastikan mereka itu warga asli sini terus nanti di data usahanya apa, berapa dananya yang dibutuhkan gitu aja sih dan lebih pendekatannya juga dari kader gitu ya dari PKK yang deket-deket aja tetangga-tetangga gitu yang kepercayaan aja lah.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian terkait sasaran program UP2K ini menunjukkan bahwa program UP2K di Kelurahan Cigending tidak menerapkan persyaratan khusus bagi calon anggotanya. Program ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha atau memiliki niat untuk memulai usaha, baik individu maupun

kelompok, tanpa batasan jenis usaha selama termasuk dalam 17 sektor usaha yang diakui. Prosedur pendaftaran juga sederhana, cukup dengan menghubungi kader PKK Pokja 2 dan menyertakan KTP untuk pendataan.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Aspek Standar dan Sasaran Program UP2K

No	Sub Aspek	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Pedoman Pelaksanaan Program UP2K	<p>Program UP2K di Kelurahan Cigending didasarkan pada berbagai peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk implementasinya. Pada praktiknya, pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending dimulai pada era Walikota Dada Rosada (2003-2013). Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga melalui dukungan modal untuk setiap kelompok PKK di berbagai kelurahan. Dalam struktur pelaksanaannya, program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dijalankan di bawah binaan PKK kecamatan. Pedoman pelaksanaan program ini disusun oleh PKK kecamatan, yang kemudian disampaikan kepada PKK di tingkat kelurahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa para pelaksana di tingkat kelurahan mengaku belum sepenuhnya memahami pedoman tersebut. Akibatnya pelaksanaan UP2K belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan para kader cenderung bertindak tanpa dasar dan teori yang kuat melainkan mengandalkan praktik yang ada di masyarakat.</p>

(1)	(2)	(3)
2	Kriteria Sasaran Penerima Program UP2K	Secara keseluruhan dari hasil penelitian terkait sasaran program UP2K ini menunjukkan bahwa program UP2K di Kelurahan Cigending tidak menerapkan persyaratan khusus bagi calon anggotanya. Program ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha atau memiliki niat untuk memulai usaha, baik individu maupun kelompok, tanpa batasan jenis usaha selama termasuk dalam 17 sektor usaha yang diakui. Prosedur pendaftaran juga sederhana, cukup dengan menghubungi kader PKK Pokja 2 dan menyertakan KTP untuk pendataan.

4.2.3 Sumber Daya Program UP2K

Jenis sumberdaya yang diteliti dalam penelitian ini mencakup sumber daya manusia dan non-manusia dengan penjelasan sebagai berikut.

4.2.3.1 Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending dari aspek sumber daya manusia (SDM) berdasarkan wawancara dan observasi dengan beberapa informan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah SDM yang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa SDM yang terlibat utama dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending adalah Pokja 2 PKK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun, meskipun mereka memiliki jabatan yang berbeda, kinerja mereka masih dikategorikan sebagai baru, mengingat mereka baru-baru ini menjadi anggota PKK, khususnya di Pokja II. Hal

ini menyebabkan pemahaman mereka terhadap program UP2K masih terbilang minim seperti penjelasan NH, “Kita juga masih baru sih ini kepengurusannya, saya juga baru jadi ketua nih, jadi masih meraba-raba gitu ya menyesuaikan program ini harus seperti apa”.

Informan NH menambahkan bahwa selain anggota Pokja 2 PKK, para pelaku usaha di wilayah tersebut juga berperan aktif dalam pelaksanaan program ini. Informan NG juga menjelaskan hal yang serupa, “Ya tentu Pokja dua karena ini kan berkaitan dengan kehidupan berkoperasi dan peningkatan pendapatan pendapatan keluarga”.

Informan TY menyampaikan bahwa terdapat tiga orang dalam Pokja 2 PKK yang terdiri dari ketua, bendahara, dan satu anggota lainnya yang khusus mengelola keuangan UP2K. Informan NH menambahkan bahwa terdapat sekitar 28 pelaku usaha yang terlibat dengan produk yang berbeda-beda, terdiri dari satu kelompok usaha dan sisanya usaha perorangan.

2. Kualifikasi SDM yang terlibat

Semua informan menyatakan bahwa tidak ada kualifikasi khusus yang diperlukan untuk terlibat dalam pelaksanaan program UP2K, asalkan mereka adalah bagian dari Pokja 2 PKK. Informan ET menambahkan bahwa anggota Pokja 2 PKK bisa berganti, menunjukkan adanya rotasi dalam keanggotaan, “yang penting anggota PKK aja cuma kan gantian gitu kan nanti kedepannya anggota pokja 2 tuh beda lagi gitu”.

Semua informan menyampaikan bahwa terdapat pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diberikan kepada SDM yang terlibat. Informan NH

menyampaikan bahwa anggota selalu diikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seperti marketing, packaging, dan memasak.

ada sih pernah ya tapi lebih ke pelatihan tentang pengembangan usaha, pelatihan kayak gitu jadi kelurahan yang mengajukan terus nanti diadakannya di mana gitu, ada udah 3x ibu ikutan, tahun berapa ya lupa lagi tahunnya, pernah juga itu teh dini ya perwakilan dari pkk ikut pelatihan di hotel gitu pernah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pengembangan kapasitas biasanya diberikan oleh pihak PKK Kecamatan Ujung Berung, Pemerintah Kota Bandung, dan dinas terkait seperti dinas UMKM sebagaimana informasi yang disampaikan oleh NH.

Oh iya dari Kecamatan dari up2k PKK Kecamatan dan pelatihannya paling segitu kalau ke Kecamatan perwakilan Biasanya jadi enggak semua semua anggota di Kelurahan ke Kecamatan paling dilist Siapa yang mau hadir gitu itu ada perwakilan palingkan kalau Kecamatan mintanya berapa orang gitu ya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan TY bahwa memang pelaksanaan program UP2K di bawah binaan PKK Kecamatan sehingga lebih banyak mengikuti kegiatan dari pihak kecamatan.

..dari UP2K sih gitu bimbingannya dari Kecamatan, kayak tahun ini ada di kecamatan ya kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan tapi lebih banyak pelatihan usaha gitu sih misalnya pelatihan memasak pelatihan-pelatihan membuat itu dari bahan-bahan kain-kain bekas Bikin lap bikin apalah gitu dari kain-kain bekas itu

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending terdiri dari anggota Pokja 2 PKK sebagai pengurus dan para pelaku usaha sebagai anggota, dengan pengembangan kapasitas yang diberikan melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan dan dinas terkait.

4.2.3.2 Sumber Daya Non-Manusia

Sumberdaya non manusia yang diteliti dalam penelitian program UP2K di Kelurahan Cigending meliputi permodalan, sarana prasarana dan teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program.

1. Permodalan

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, seperti halnya pada program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), permodalan merupakan hal vital untuk mendukung usaha-usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat. Sumber permodalan program UP2K di Kelurahan Cigending melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga bantuan dari lembaga swasta.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa modal awal program UP2K di Kelurahan Cigending berasal dari pemerintah, tepatnya pada era Walikota Dada Rosada dengan jumlah sekitar Rp5 juta seperti pernyataan informan TY.

..ya modal awal kan dari yang Pa Dada Rosada itu 5juta nah dari situ itu jadi berputar dari hasil usaha UP2K atau ada dari donatur, misalnya dari luar dari dulu dari 5 juta sekarang sudah berapa tahun ya itu kita sudah terkumpul sekitar 15 sampai 16 juta.

Selain dari pemerintah, modal tambahan juga diperoleh dari lembaga zakat seperti "Zakatku" yang memberikan dukungan berupa modal, bimbingan produksi, dan pemasaran selama dua tahun sebagaimana pernyataan informan NH.

Awalnya dari pemerintah itu terus ada juga pernah buat usaha kelompok itu dari zakatku, lama-lama sudah bisa mandiri paling ke koperasi rw dulu pinjamnya, zakatku cuma 2 tahunan dibimbingnya dari mulai modal, terus bimbingan produksi, pemasaran kayak gitu cuma sekarang sudah enggak.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pelaku usaha yang mengikuti program UP2K yakni informan NT sebagai bagian dari kelompok usaha Abon Lele.

Iya dulu usaha abon lele ini ada pemberian modal dari lembaga zakat itu zakatku, itu dikasih modal sama pembinaannya semua dari 0 sama mereka tapi nggak lama cuma 2 tahun sama yang dari teh dini sendiri yang modal itu teh dini juga kan gabung ya ke abon lele itu warga sini kan RW 09 ya sebagian ada dari yang pemerintah itu.

Modal awal ini kemudian digunakan untuk mendukung usaha-usaha kecil yang dikelola oleh anggota PKK dan masyarakat setempat dalam bentuk simpan pinjam sebagaimana penjelasan informan ET.

Awalnya buat memberdayakan ibu-ibu pkk buat berwirausaha karena kita kan para ibu rumah tangga juga ya nah berkembang dijadikan simpan pinjam gitu buat para pelaku usaha dari masyarakat yang mau meminjam buat modal usahanya gitu.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan TY bahwa sistem simpan pinjam ini menerapkan limit peminjaman.

..lalu berkembang ada sistem simpan pinjam juga, dulu ada uang wajib dan sukarela, kalau sekarang hanya simpan pinjam dan sukarela saja untuk tabunganya. Jadi setiap anggota itu boleh pinjam untuk keperluan usaha mereka itu dari 500 - 1 juta limitnya

Melalui konsep simpan pinjam ini anggota UP2K masyarakat dapat memperoleh modal awal untuk pengembangan usaha mereka. Sistem simpan pinjam juga membantu dalam manajemen keuangan dan pengembangan usaha dengan memberikan akses lebih mudah terhadap modal dan fasilitas pendukung usaha seperti penjelasan informan TY.

...kayak kemarin juga ada yang butuh modal untuk mesin pemotong kentang itu harus seharga 3 juta kita pertimbangkan tergantung usahanya ya lihat tapi kita jarang-jarang mengeluarkan modal yang besar gitu nah paling 5 sampai 1 juta itu pun kalau misalnya untuk mengeluarkan sebesar itu masih jarang paling satu orang lah dilihat dulu usahanya.

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa dalam sistem simpan pinjam ini tidak semua pelaku usaha berhak meminjam modal dengan jumlah yang besar untuk keperluan yang tidak terlalu mendesak, simpan pinjam UP2K masih berhati-

hati dalam memberikan modal atau pinjaman besar kepada masyarakat. Mereka lebih cenderung untuk mengevaluasi prospek usaha, latar belakang usaha, serta keseriusan dan komitmen individu/kelompok usaha terkait untuk mengembangkan usahanya sebelum memberikan dukungan finansial yang lebih besar.

Informan RM sebagai pelaku usaha juga menjelaskan hal yang serupa terkait pengalaman meminjam modal dalam sistem simpan pinjam UP2K serta pertimbangan para kader dalam memberikan modal yang besar kepada para pelaku usaha ini.

Ada simpan pinjam itu, ibu juga untuk yang sekarang ikut pinjam, sekali cicilan lagi pinjam sedikit sih 500rb jadi memang kecil kecil sih diberi pinjaman, gatau ya mungkin kurang berputar di kelurahannya ya karena cicilan nya cepet 3x makanya jarang ada mungkin takut ya takut nggak kebayar juga jadi gabisa pinjam besar.

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan perangkat kelurahan, diketahui bahwa pertimbangan nominal pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada para pelaku usaha ini dikarenakan untuk menghindari kesulitan pembayaran bagi para pelaku usaha yang tidak konsisten dalam membayar, sehingga perlu adanya koordinasi dengan perangkat kelurahan sebagai pengawas program UP2K seperti pernyataan NG selaku Kasi Ekbang Kelurahan Cigending.

Jadi sebelum dia meminjam kita koordinasi dulu ya gimana nih orangnya gimana ya, kita diskusikan sama pengurus PKK dia mau gabung dan minjam uang berapa, untuk apa terus orangnya seperti apa apakah punya rekam jejak punya utang atau bagaimana gitu ya jadi layak atau tidak nih diberikan pinjaman gitu.

Beberapa kader UP2K dan perangkat kelurahan menjelaskan bahwa ada pengalaman yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman modal. Salah satu kasus yang diungkapkan adalah ketika seorang penerima modal

pindah rumah tanpa pemberitahuan, sehingga sulit untuk menagih kembali pinjaman tersebut seperti penjelasan ET, “Pernah itu sampe dikasih surat pernyataan ternyata dianya pindah rumah soalnya mau dicari juga gaada orangnya, ternyata dia bukan orang sini dulunya kasihan gitu dia itu buka usaha kecil-kecilan jadi dibantu oleh UP2K”.

Selain itu, ada juga kasus lain yang dijelaskan oleh informan ET dimana seorang peminjam memiliki rekam jejak berhutang ke berbagai pihak dan diketahui oleh para kader. Karena kekhawatiran akan kemampuan peminjam tersebut untuk mengembalikan pinjaman, permintaan pinjaman akhirnya ditolak.

..ah pernah juga ada yang ditolak gitu ya peminjaman jadi dianya tuh berhutang ke sana ke sini gitu ya udah ada rekam jejak gitu berhutang kesana kesini kayak ke bank emok pinjol gitu udah pada tau lah kader kalau orang ini berhutang kesana kesini jadi kita khawatir nggak dibayar makanya ditolak aja gitu.

Dari hasil wawancara lebih lanjut, para kader dan perangkat kelurahan sangat berharap pemberian modal melalui program UP2K ini dapat benar-benar membantu para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam mengembangkan usahanya. Informan NG menjelaskan tujuan utama dari sistem simpan pinjam ini adalah untuk memberikan alternatif pinjaman yang lebih aman dan terpercaya dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga-lembaga tidak resmi seperti "bank emok" yang seringkali memiliki bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis seperti penjelasan informan NG, “..karena tujuan utamanya kan menghindari pinjaman agar mereka nggak selalu ke bank emok atau pinjaman ilegal yang bunga nya tuh besar gitu, jadi kita menyediakan buat mereka khususnya untuk pengembangan usaha”.

Berdasarkan pernyataan informan NG, dengan meminjam melalui program ini, para pelaku usaha tidak hanya mendapatkan modal yang mereka butuhkan, tetapi juga berada dalam sistem yang diawasi dan didukung oleh perangkat kelurahan, sehingga lebih aman dan legal. Mereka berharap bahwa para pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman ini dapat konsisten dan mau membayar kembali pinjaman mereka dengan rutin. Jika para pelaku usaha dapat mematuhi aturan dan membayar kembali pinjaman dengan disiplin, maka modal ini dapat terus berputar dan membantu lebih banyak pelaku usaha lainnya. Keyakinan ini disampaikan oleh informan ET, ”..daripada pinjam ke bank emok kan, misalnya pinjam 200.000 kalau kita niat bener mau usaha insyaallah berkembang kan, terbantu lah usaha kecil-kecilan gini dari UP2K”.

2. Sarana Prasarana

Sarana merujuk kepada peralatan dan bahan yang digunakan langsung dalam kegiatan program, seperti mesin, alat produksi, bahan baku, dan teknologi. Prasarana, di sisi lain, mencakup fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program, seperti bangunan, ruang pertemuan, transportasi, dan jaringan komunikasi.

Sumber daya sarana prasarana dalam program UP2K di Kelurahan Cigending saat ini masih terbatas pada pemberian modal kepada pelaku usaha melalui sistem simpan pinjam yang disediakan oleh PKK. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan, yang menyatakan bahwa bantuan dari UP2K sejauh ini hanya berupa permodalan melalui sistem simpan pinjam sebagaimana penjelasan RM,

Belum ada sih sejauh inimah kalo dari UP2K, cuman paling ngebanu dari segi permodalan yang simpan pinjam itu aja”.

Sebagaimana penjelasan informan RM, informan NG juga menjelaskan hasil serupa terkait tidak adanya fasilitas yang diberikan dalam program UP2K ini, “Belum ada sih kita kalau berbentuk fasilitas sarana prasana kayak alat-alat gitu ya hanya pemberian modal aja”.

Informan NH juga menjelaskan bahwa tidak ada pemberian peralatan atau bahan baku khusus untuk para pelaku usaha, seluruh peralatan yang digunakan berasal dari masyarakat itu sendiri baik usaha kelompok maupun perorangan, “Kebanyakan sih punya pribadi ya kita secara peralatan gitu gak menyupport sih kalau yang kelompok abon lele itu milik kelompok itu cuma dulu beli peralatnya dari yang Zakatku itu”.

Namun, disisi lain, PKK bersama perangkat kelurahan turut memfasilitasi produk-produk UP2K tersebut untuk dipamerkan dalam berbagai kegiatan, rapat, atau pertemuan rutin di kelurahan. Hal ini bertujuan sebagai sarana pemasaran bagi para pelaku usaha dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produk mereka. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yakni NT, “Kalau masalah ya fasilitas khusus nggak ada sih tapi di fasilitasi itu mah harus diakui ada kayak bazar yuk di fasilitasi nih di sini gitu disediakan tempat ini khusus buat produk UP2K gitu aja sih, jadi lebih ke fasilitas pemasarannya”.

Dukungan pemasaran yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam program UP2K ini memberikan manfaat positif bagi para pelaku usaha. Melalui berbagai kegiatan pemasaran seperti bazar, pameran, dan acara lainnya, produk-produk dari

pelaku usaha mendapatkan peminat yang lebih luas. Pihak kelurahan juga membantu dalam menghubungkan pelaku usaha dengan pasar potensial di tingkat kota, sehingga meningkatkan peluang orderan dan penjualan produk. Seperti yang disampaikan informan NT selaku ketua kelompok usaha, “..jadi kita tuh Alhamdulillah dari situ dipermudah gitu kita ada orderan dibantu sama mereka dari pihak pemerintah kota juga”.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti secara langsung melihat proses promosi produk saat bazar yang diselenggarakan oleh PKK. Dalam bazar tersebut, berbagai produk lokal yang dibuat oleh anggota PKK, dipromosikan kepada masyarakat. Peneliti menyaksikan interaksi aktif antara penjual dan pengunjung, di mana anggota PKK menjelaskan keunggulan produk mereka, memberikan sampel, serta menawarkan harga promosi untuk menarik minat pembeli. Observasi ini menguatkan bukti bahwa dalam program UP2K ini, mereka aktif dalam mendukung dan mengembangkan usaha mikro yang dijalankan oleh para ibu rumah tangga.



Gambar 4.2 Kegiatan Bazar Ramadhan Tahun 2024
Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha lain yang terlibat dalam program UP2K di Kelurahan Cigending, ada harapan yang kuat dari para pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana, bukan

hanya permodalan dan pemasaran saja. Salah satu informan menyebutkan bahwa selama ini, bantuan dari UP2K hanya berupa modal melalui sistem simpan pinjam. Namun, mereka berharap bisa mendapatkan fasilitas pendukung seperti alat-alat produksi setelah mengikuti pelatihan sebagaimana penjelasan informan RM.

Kalo dari UP2K mah sebenarnya gada, kita ngga dikasih sarana prasarana. kita tuh ya pengennya abis ikut pelatihan misal ada dikasih alat-alatnya gitu, kayak dulu pernah ikut pelatihan dikasih tuh alat apa loyangnya, cetakan gitu nah pengennya bisa dibantu juga dari segi peralatannya gitu buat fasilitas pendukung.

3. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha menjadi faktor penting yang memberikan berbagai keuntungan bagi para pelaku usaha, termasuk mereka yang tergabung dalam program UP2K di Kelurahan Cigending. Teknologi informasi memungkinkan akses lebih luas dan efisien untuk pemasaran, komunikasi, serta manajemen operasional usaha.

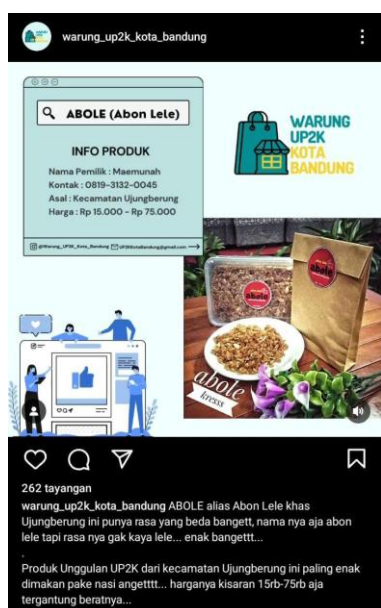
Berdasarkan hasil wawancara, teknologi informasi digunakan terutama untuk promosi produk melalui berbagai platform media sosial. Salah satu bentuk media sosial yang digunakan adalah melalui Instagram, di mana produk-produk UP2K dipromosikan seperti pernyataan informan NG, “Kita pake medsos aja ya pake grup gitu grup PKK Kelurahan Cigending terus ada instagram PKK Kelurahan Cigending juga buat saling berbagi informasi dan promosi produk-produk UP2K”.

Sebagai contoh, usaha kelompok abon lele telah dipromosikan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti istri mantan Wali Kota Bandung. Promosi ini membantu produk tersebut dikenal lebih luas dan diakui sebagai produk unggulan Kecamatan Ujung Berung. Instagram PKK Kota Bandung juga digunakan untuk membagikan

informasi terkait kegiatan dan promosi produk-produk yang disediakan melalui warung UP2K Kota Bandung dan usaha abon lele milik masyarakat Kelurahan Cigending tersebut menjadi salah satu produk unggulan yang dipromosikan hingga di tingkat kota, sebagaimana informasi dari informan NH.

Kita itu suka promosi ya ada dipromosin di instagram gitu sama warung UP2K Kota Bandung ada instagramnya itu salah satunya yang abon lele itu diakui sebagai makanan khas Ujung Berung, terus kalau promosi gitu yang abon lele suka di endorse pernah sama istrinya Pa Oded.

Penggunaan teknologi informasi seperti media sosial warung UP2K yang dikelola oleh PKK Kota Bandung dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 4.3 Penggunaan media sosial Warung UP2K PKK Kota Bandung
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti



Gambar 4.4 Penggunaan media sosial Usaha Abon Lele
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Selain Instagram, media sosial lain seperti WhatsApp juga digunakan untuk promosi dan berbagi informasi antar pelaku usaha. Grup WhatsApp UP2K Cigending menjadi sarana untuk para pelaku usaha saling bertukar informasi dan mempromosikan produk mereka.

Sebagian pelaku usaha lain secara mandiri menggunakan status WhatsApp untuk menampilkan produk mereka kepada kontak mereka, yang membantu dalam meningkatkan penjualan secara langsung seperti penjelasan informan RM, “Kalau ibu juga suka pasang status wa aja di wa aja tapi kayanya anak-anak ibu ada deh buat marketplace juga, soalnya ibu nggak berani takutnya banyak pesanan melonjak sedangkan ibunya nggak sanggup”.

Meskipun tidak semua pelaku usaha menggunakan teknologi informasi secara intensif, beberapa dari mereka merasa terbantu dengan adanya media sosial PKK untuk promosi. Ada pelaku usaha yang lebih memilih pendekatan tradisional seperti promosi melalui mulut ke mulut atau menerima pesanan secara pre-order untuk mengatur kapasitas produksi mereka seperti pernyataan informan TS. “..kalau saya via wa aja sih kebanyakan orderan gitu langsung ke rumah tapi saya selalu buat juga setiap hari yang bisa langsung ke rumah aja gitu”.

Berdasarkan hasil observasi ke rumah informan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kelurahan Cigending membuka warung di rumah mereka untuk menjual produk mereka. Penggunaan rumah sebagai tempat usaha ini memudahkan para pelaku usaha, terutama ibu rumah tangga, dalam mengelola bisnis mereka sambil tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha dalam program UP2K di Kelurahan Cigending telah membantu memperluas jangkauan pemasaran produk mereka dan meningkatkan visibilitas usaha di mata masyarakat luas.

Tabel 4.10 Rekapitulasi Aspek Sumber daya Program

No	Sub Aspek	Hasil
(1)	(2)	(3)
Sumber daya Manusia		
1	Jumlah SDM yang terlibat	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa SDM yang terlibat utama dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending adalah Pokja 2 PKK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun, meskipun mereka memiliki jabatan yang berbeda, kinerja mereka masih dikategorikan sebagai baru, mengingat mereka baru-baru ini menjadi anggota PKK, khususnya di Pokja II. Hal ini menyebabkan pemahaman mereka terhadap program UP2K masih terbilang minim. Selain anggota Pokja 2 PKK, para pelaku usaha di wilayah tersebut juga berperan aktif dalam pelaksanaan program ini. Saat ini terdapat 28 pelaku usaha yang terdiri dari satu usaha kelompok dan sisanya usaha individu yang didominasi oleh para perempuan dan Ibu Rumah Tangga (IRT).
2	Kualifikasi SDM yang terlibat	Semua informan menyatakan bahwa tidak ada kualifikasi khusus yang diperlukan untuk terlibat dalam pelaksanaan program UP2K, asalkan mereka adalah bagian dari Pokja 2 PKK. Semua informan menyampaikan bahwa terdapat pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diberikan kepada SDM yang terlibat.
Sumberdaya Non Manusia		
1	Permodalan	Modal awal program berasal dari pemerintah dan lembaga zakat, yang kemudian digunakan dalam sistem simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil. Sistem ini memberikan akses modal dengan jumlah yang terbatas dan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah pembayaran. Modal awal yang berasal dari pemerintah dan lembaga zakat dalam program UP2K ini menunjukkan dukungan keuangan yang kuat.

(1)	(2)	(3)
2	Sarana Prasarana	Secara sarana prasarana memang bantuan dalam bentuk peralatan atau bahan baku khusus belum tersedia, namun PKK dan perangkat kelurahan turut memfasilitasi pemasaran produk melalui berbagai kegiatan seperti bazar dan pameran.
3	Teknologi Informasi	Penggunaan teknologi informasi, terutama media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, telah dimanfaatkan untuk promosi produk dan berbagi informasi antar pelaku usaha. Meskipun tidak semua pelaku usaha menggunakan teknologi informasi secara intensif, media sosial terbukti membantu dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan jangkauan produk mereka.

4.2.4 Karakteristik dan Sikap Agen Pelaksana Program UP2K

Karakteristik dan sikap agen pelaksana sangat mempengaruhi proses dan hasil implementasi program UP2K, karakteristik disini menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab, strategi yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan kader dalam melaksanakan program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending mempunyai struktur dimulai dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua kelompok dan anggota, sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY, “.. kita ada ketua sekretaris dan bendahara aja bertiga di pokja 2 karena kan pokja 2 yang membawahi program UP2K ini”.

Berdasarkan informasi yang didapat, struktur inti dari pengurus UP2K diambil dari Pokja 2 PKK kelurahan, sedangkan ketua kelompoknya diambil dari masyarakat yang mempunyai usaha kelompok sebagaimana yang disampaikan oleh informan ET. Meski demikian pengakuan dari informan NH menyampaikan tidak ada pembagian tugas yang signifikan.

..nggak ada pembagian tugas juga ya kitamah bareng-bareng aja kayak buat administrasi gitu bareng-bareng aja lah, kalau saya gamau menanggung sendiri-sendiri gitu jadi barengan aja lah, paling yang bendahara umum itu, bendahara khusus buat UP2K jadi 4 orang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, para agen pelaksana yang terdiri dari kader pokja 2 belum memahami secara penuh bagaimana pelaksanaan UP2K seharusnya berjalan sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan UP2K yang lebih lanjut seperti pengakuan informan NH.

Pelaksanaan UP2K Kelurahan Cigending juga tidak memiliki strategi khusus, sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY.

Eggak sih enggak ada strategi ini cuman sosialisasikan setiap bulan sekali Kita selalu ada pertemuan Nih untuk pertemuan tp pkk itu di setiap mengundang setiap wilayah waktu itu Ya kita sosialisasi saja di sana. Setiap bulan sekali itu sosialisasi aja. Siapa yang butuh modal, siapa yang punya produk baru gitu nanti kita bawa ke kota gitu.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, strategi yang diterapkan oleh pengurus dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending melibatkan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh PKK kepada kader di tingkat RW atau wilayah untuk mengajak masyarakat bergabung dalam program tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengurus UP2K Cigending untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dengan pembinaan rutin setiap 1 bulan, baik itu berasal dari pihak PKK, kelurahan, kecamatan ataupun pemerintah kota dan dinas-dinas terkait, hal ini sebagaimana informasi yang disampaikan oleh informan ET, “ada kayak pembinaan atau kayak gituan setiap 1 bulan sekaligus dari pemerintahan itu ada juga ada dari Kecamatan juga ada pembinaan kayak gitu ada laporan juga harus ada kan triwulan sekali ya harus laporan pembukuannya”.

Hal serupa terkait kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan UP2K juga disampaikan oleh informan NH sebagai berikut.

..ada pembinaanya cuma sama kecamatan langsung nanti, kalau kita yang mengadakan sih jarang ya, ikut di undang aja sama pkk kecamatan mulai dari pengemasan, pembukuan, sampai ke management keuangan dan management pekerja gitu kan biasanya misal susah cari pekerja bahkan susah cari legalitas halal kayak gitu, biasanya suka ada pengumuman siapa yang mau bikin logo halal kayak gitu nanti kita bantu.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh pengurus, UP2K Kelurahan Cigending juga menyediakan bantuan pinjaman modal untuk mendukung pengembangan usaha sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan label halal dan izin usaha sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY.

Pertama pinjaman modal, terus kita kan selalu kalau ada momen apa kita selalu bawa mereka untuk menampilkan produknya untuk ikut bazar gitu memfasilitasi di bagian promosi dan pemasaran juga terus bagaimana mendapat apa sertifikat halal seperti begitu ya kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan di kecamatan aja.

Pengurus UP2K Kelurahan Cigending juga melakukan pendataan kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pelaku usaha dalam pengembangan produk mereka, hal ini disampaikan oleh informan NH.

Kadang kita yang datang, mendata gitu ini usahanya udah berapa lama, kemana aja penjualanya, nanti ada pelatihan ini ikut ya kita masukkan ke group jadi kadang masyarakat mah gatau asal produksi aja gatau nanti pemasarannya kemana.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh NH, informan ET juga menyampaikan hal serupa bahwa para kader seringkali melakukan sosialisasi skala kecil untuk memberikan informasi seputar peminjaman modal usaha.

Pertemuan rutin juga biasa dilakukan dengan mengundang perwakilan dari setiap wilayahnya untuk memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY.

Kita selalu ada pertemuan tp pkk itu di setiap pertemuan mengundang setiap wilayah waktu itu ya kita sosialisasi saja di sana ke kadernya nanti disampaikan lagi ke masyarakat siapa yang butuh modal, siapa yang punya produk baru gitu nanti kita bawa ke kota gitu.

Pengurus UP2K di Kelurahan Cigending mengidentifikasi kebutuhan dan masalah penerima manfaat melalui berbagai metode seperti koordinasi awal, diskusi dengan pengurus PKK, serta mendata usaha dan kondisi peminjam. Mereka juga melakukan sosialisasi dalam pertemuan PKK dan memberikan pelatihan serta bimbingan rutin. Selain itu, agen pelaksana mengadakan pembinaan bulanan, laporan triwulan, serta melibatkan produk-produk lokal dalam bazar dan kegiatan lain untuk meningkatkan pemasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan dukungan yang sesuai dan berkelanjutan.

Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pengurus namun masih ada kendala dalam pelaksanaan UP2K sebagaimana disampaikan oleh informan ET.

Pernah ada yang susah bayar cicilan simpan pinjam, itu sampe dikasih surat pernyataan ternyata dianya pindah rumah soalnya mau dicari juga gaada orangnya, ternyata dia bukan orang sini dulunya kasian gitu dia usaha kecil-kecilan jadi dibantu Oke saya misalnya punya usaha ini tapi dia butuh modal yang besar misalnya nah kita belum berani mengeluarkan modal sebesar itu.

Hambatan ini disebabkan karena peminjam modal ke UP2K seringkali terlambat atau bahkan pergi tanpa sepengetahuan pengurus yang menyebabkan mereka tidak berani untuk memberikan modal yang besar. Meskipun tidak semua informan melaporkan adanya hambatan besar, beberapa menyebutkan bahwa penjualan produk juga menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi persaingan dan perubahan preferensi konsumen.

Tabel 4.11 Rekapitulasi Aspek Karakteristik dan Sikap Agen Pelaksana

No (1)	Sub Aspek (2)	Hasil (3)
1	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	Agen pelaksana dalam program UP2K di Kelurahan Cigending memiliki struktur yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pencatatan simpan pinjam. Selain itu dalam pelaksanaannya UP2K memiliki ketua kelompok, yang dimana tugasnya sebagai pengorganisir kelompok usaha di daerahnya (RW). Semua tugas dilaksanakan secara bersama-sama tanpa pembagian yang jelas. Selain itu, ada juga peran dari perangkat kelurahan yakni kasi ekonomi pembangunan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending seperti kelancaran pembayaran modal serta mengidentifikasi hambatan yang ada

(1)	(2)	(3)
2	Kegiatan yang dilakukan	strategi yang diterapkan oleh pengurus dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending melibatkan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh PKK kepada kader di tingkat RW atau wilayah untuk mengajak masyarakat bergabung dalam program tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengurus UP2K Cigending untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dengan pembinaan rutin setiap 1 bulan, baik itu berasal dari pihak PKK, kelurahan, kecamatan ataupun pemerintah kota dan dinas-dinas terkait,

4.2.5 Hubungan Antar Organisasi atau Kemitraan Program UP2K

Hubungan antar organisasi atau kemitraan merujuk pada interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengimplementasikan program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Hubungan Kerjasama dengan Kecamatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan program UP2K di Kelurahan Cigending sudah melakukan kerja sama dan bermitra dengan pihak kecamatan sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH, “.. dari UP2K sih gitu bimbingannya dari PKK Kecamatan kalau ada kegiatan apapun disampaikan lewat kecamatan aja pokoknya”.

Pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending seringkali mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari PKK kecamatan, mereka juga seringkali memberikan informasi dan undangan untuk mengikuti pelaksanaan bazar di beberapa kegiatan agar dapat diikuti oleh UP2K Kelurahan Cigending, sebagaimana yang

disampaikan oleh informan NH, “Kalau kecamatan pas ada bazar-bazar di kecamatan khusus produk UP2K gitu gratis ga usah bayar buka stand aja, kalau yang lain kan bayar ya 100rb kalau produk up2k gratis disediakan meja stand buat 5 kelurahan di Ujung Berung”.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan ET, bahwa PKK Kecamatan memberikan pelatihan dan pembinaan untuk UP2K Cigending, “Itu buat pelatihan pelatihan dari kecamatan ya, terus kalo bazar gitu sering sih, apalagi kalau ada undangan pelatihan gitu ke pkk dari kecamatan untuk UP2K, ada 3-4 kali lah dalam setahun”.

Berdasarkan informasi yang didapatkan UP2K Cigending sering dilibatkan dalam kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh kecamatan atau dinas-dinas terkait, mereka juga melakukan pembinaan dan pelatihan tiga sampai empat kali dalam setahun untuk pengembangan UP2K di tingkat kelurahan.

2. Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Sosial

Lembaga sosial seperti Zakatku dan PUSPEL PP juga kerja sama dengan UP2K Cigending dalam bentuk pemberian modal dan pembinaan sebagaimana yang disampaikan oleh NH sebagai berikut.

...dari Zakatku cuma 2 tahunan dibimbingnya dari mulai modal, terus bimbingan produksi, peralatan di support sama mereka terus pemasaran kayak gitu cuman sekarang udah engga, udah lepas lah udah mandiri. Kalo dari PUSPEL PP itu juga nanti ada pembinaanya mulai dari pengemasan, pembukuan, sampai ke management keuangan dan manajemen pekerja gitu.

Lembaga sosial Zakatku memberikan modal sebesar 2 juta untuk modal awal pengembangan usaha kelompok Abon Lele yang dilakukan di RW 09 Kelurahan Cigending dan 300 ribu untuk usaha perorangan. Selain memberikan

bantuan modal mereka juga memberikan bantuan alat produksi serta membantu pemasaran produk. Informan RM selaku pelaku usaha juga menyampaikan, "...kalo dari zakatku dikasih modal 300 ribu sempet kita diliput sama 2 orang gitu ya buat liatin produksi".

Sedangkan PUSPEL-PP kerja sama dalam bentuk pembinaan peningkatan usaha dengan melakukan pelatihan mulai dari pelatihan pengemasan, pembukuan, manajemen usaha dan manajemen pekerja sekaligus memberikan kemudahan pelaku usaha dalam membuat legalitas usaha seperti PIRT dan label Halal seperti penjelasan informan NH, "...kita suka ada pengumuman gitu siapa yang mau buat label halal gitu PIRT itu kita sudah disediakan itu".

3. Hubungan Kerjasama dengan Koperasi

Selain dari pihak kecamatan dan lembaga sosial, UP2K Kelurahan Cigending juga bekerja sama dengan koperasi yang ada di kelurahan dan dinas-dinas terkait seperti dinas UMKM dan Koperasi, sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY.

Kita kerjasamanya sama koperasi sih koperasi yang di kelurahan Koperasi di Kelurahan sudah berbadan hukum. Ngebantu untuk ngasih bantuan modal gitu buat para pelaku usaha. Terus kota Bandung aja paling sama Dinas kaya dinas UMKM aja kalau ada kegiatan sama tahun ini ada sih di kecamatan ya kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh TY, informan TS salah satu pelaku usaha juga menyampaikan hal berikut.

Ya kebanyakan promosi penjualan ya, pernah juga dari dinas UMKM itu saya dulu pernah dapat bantuan sekali-kalinya itu gitu, tapi saya betul untuk beli bahan-bahan ya gitu sekali-kalinya pernah kan di survei itu kan pas ketika lagi sudah berlangsung pinjaman itu datangnya yang surveinya.

UP2K Kelurahan Cigending melakukan kerja sama juga dengan Koperasi Kelurahan Cigending dalam hal pemberian bantuan modal, mereka juga memberikan bantuan cicilan pembelian alat dan barang untuk produksi usaha. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal langsung kepada pelaku usaha.

Kerja sama atau kemitraan yang dibangun oleh UP2K Cigending memberikan beberapa manfaat, sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH, “Alhamdulillah produk kita jadi dikenal gitu lewat stand/bazar yang disediakan sama kecamatan gitu ya, terus yang kelompok abon lele juga itu mereka udah sampai ke kota jadi udah terkenal di tingkat PKK Kota Bandung masuk ig nya juga warug UP2K Kota Bandung”.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH, informan ET menyampaikan hal serupa, “Alhamdulillah jadi tahu buat ngembangin usaha kayak pelatihan pengemasan, terus pelatihan pembuatan inovasi makanan gitu, sama bazar bazar itu membantu buat penjualan”.

Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa kerjasama dengan kemitraan Kelurahan Cigending memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam aspek promosi dan peningkatan keterampilan. Para pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen keuangan, pengemasan, dan inovasi produk. Selain itu, keikutsertaan dalam stand dan bazar yang disediakan oleh kecamatan telah membantu memperluas jangkauan pemasaran produk mereka, seperti abon lele yang kini dikenal luas di tingkat Kota Bandung. Informan RM sebagai pelaku usaha juga menyampaikan bahwa kerja

sama yang dilakukan memiliki manfaat yang signifikan terutama untuk peningkatan skill dan promosi produk UP2K, “.. kebantu dari segi pemasaran kan kita juga terbatas ya pemasarannya, terus kalau modal alhamdulillah ngebantu buat beli bahan-bahan”.

Meskipun demikian masih ada beberapa hambatan atau tantangan dalam membangun hubungan kerja sama atau kemitraan, sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH.

Sebenarnya sekarang tuh yang susah ketika banyak pelatihan gitu ya cuma udah pada lemah (kurang berminat masyarakat) buat ikutan pelatihan gitu. Sekarang mah justru yang mentok tuh penjualan kayaknya, emang pelatihan kan untuk meningkatkan penjualan ya, tapi pada akhirnya kan sekarang ya gitu.

Informan NT salah satu pelaku usaha menyampaikan hal serupa terkait kendala dan hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan usahanya.

..enggak konsisten jadi kerjasamanya enggak konsisten, terus kalau bazar misal di mall kayak gitu juga tetep aja kita bayar gitu kan, terus kalau endorse gitu kan kita ngeluarin biaya sebenarnya buat produksi tapi nggak dibayar gitu kan cuma yaudahlah gitu.

Secara keseluruhan hasil wawancara dengan kader UP2K menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak mengalami hambatan yang signifikan. Namun, tantangan utama adalah penurunan partisipasi dalam pelatihan, hal ini karena penjualan produk UP2K menurun. Ini mengindikasikan bahwa meskipun hubungan kemitraan berjalan dengan baik, ada masalah dalam motivasi dan keikutsertaan dalam program peningkatan keterampilan.

Tabel 4.15 Rekapitulasi Aspek Hubungan Antar Organisasi atau Kemitraan

No	Sub Aspek	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Hubungan Kerjasama dengan Kecamatan	Pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending seringkali mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari PKK kecamatan, mereka juga seringkali memberikan informasi dan undangan untuk mengikuti pelaksanaan bazar di beberapa kegiatan agar dapat diikuti oleh UP2K Kelurahan Cigending, sebagaimana yang disampaikan oleh informan
2	Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Sosial	Lembaga sosial seperti Zakatku dan PUSPEL PP juga kerja sama dengan UP2K Cigending dalam bentuk pemberian modal dan pembinaan. Lembaga sosial Zakatku memberikan modal sebesar 2 juta untuk modal awal pengembangan usaha kelompok Abon Lele yang dilakukan di RW 09 Kelurahan Cigending dan 300 ribu untuk usaha perorangan. Selain memberikan bantuan modal mereka juga memberikan bantuan alat produksi serta membantu pemasaran produk.
3	Hubngan Kerjasama dengan Koperasi	UP2K Kelurahan Cigending melakukan kerja sama juga dengan Koperasi Kelurahan Cigending dalam hal pemberian bantuan modal, mereka juga memberikan bantuan cicilan pembelian alat dan barang untuk produksi usaha. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal langsung kepada pelaku usaha.

4.2.6 Kondisi Sosial

Kondisi sosial menjabarkan bagaimana implementasi UP2K memberikan dampak dan pengaruh, serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Dukungan Masyarakat dalam Program UP2K

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat antusias dalam pelaksanaan program UP2K, mereka termotivasi untuk menciptakan usaha untuk membantu perekonomian keluarga karena kemudahan pinjaman modal dari UP2K. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH.

..iya semuanya dari masyarakat sih antusias buat jualan gitu, ada yang pribadi ada yang kelompok itu kebanyakan justru dari usaha pribadinya ada yang keluarga gitu kayak usaha catering di RW 5 itu mah keluarga memberdayakan keluarga gitu. Kalau disini memberdayakan ibu-ibu kan ya yang abon lele.

Sesuai yang disampaikan oleh informan NH, informan ET juga menyampaikan hal berikut, “Masyarakat sih alhamdulillah ya kayak ibu ini dibantu sama warga sini gitu kalau produksi, banyak juga yang antusias gitu pinjam modal kayak usaha kecil kayak tukang bakso gitu pada pinjam ya lumayan”.

Dukungan sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program juga tak lepas dari peran kader UP2K dan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan UP2K, sebagaimana yang disampaikan oleh informan NT salah satu pelaku usaha.

Alhamdulillah masyarakat di rw sini mah kreatif-kreatif ya, pemimpin kita di atas teh juga bagus gitu membuka wadah nih buat kreatifitas warga, ya walaupun nggak banyak sih cuma ya ada aja yang kreatif gitu bikin miniatur dan keseluruhan ini khususnya yang abon lele kenapa nih up2k kita masih berjalan segini ya ini atas berkat bantuan tim dari ibu-ibu yang direkrut ini gitu dari semangatnya mereka.

Faktor-faktor kebersamaan, kreativitas dan keinginan masyarakat untuk mencari tambahan pendapatan juga menjadi hal yang mendukung pelaksanaan program UP2K sebagaimana yang disampaikan oleh informan TY.

Ada kebersamaan sih ya, kekeluargaan gitu jadi gampang buat merekrut siapa yang mau usaha sebenarnya jadi ya ada kebutuhan yang sama gitu

lah. Faktor dari merekanya aja sih, keinginan ibu ibu rumah tangga gitu, ya ibu-ibu kan nambah aja lah nambah-nambah penghasilan gitu kan gitu kita sosialisasinya seperti itu untuk ya supaya kita nggak minta banget lah ke suami gitu. Bagaimana kita bisa berkarya sendiri begitu.

2. Dampak Sosial Program UP2K

Secara tidak langsung, program UP2K membantu memfasilitasi masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk memberikan ilmunya dalam beberapa pertemuan masyarakat seperti di kegiatan posyandu, seperti yang disampaikan informan RM selaku salah satu pelaku usaha.

..kayak ibu RW biasanya suka ngajak ke saya pas kegiatan posyandu ngisi materi cara buat kue buat ibu-ibu yang lain nah nanti pertemuan berikutnya bagian ibu yang lain sharing keahlian sama ilmu gitu jadi disinimah bener-bener memberdayakan ibu-ibu gitu yang punya keahlian apa ilmu apa ayok disalurkan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program UP2K juga memberikan dampak positif terhadap interaksi sosial warga, sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH.

.. kalau tujuan yang usaha kelompok gini mah yang penting happy ibu-ibu mah. Karena ketika ketemu buat produksi kita tuh sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan bareng. Alhamdulillah banyak yang sudah terbantu, justru dari satu pelaku usaha itu membawa peluang usaha baru buat masyarakat sekitarnya, kayak usaha kelompok gitu kan dari masyarakat untuk masyarakat kan ya jadi seneng gitu saling bantu walaupun ya kegiatannya hanya sebatas modal dan modal

Hal serupa juga disampaikan oleh informan NT selaku ketua kelompok usaha abon lele rw 09 yang memberikan manfaat pada kebersamaan ibu-ibu setempat, “Dengan kelompok usaha ini alhamdulillah ibu-ibu jadi ada kegiatan, jadi intinya mah ya itu pengen merubah mindset orang”.

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses produksi salah satu usaha kelompok masyarakat yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini, pelaksanaan

UP2K memberikan perubahan sosial dalam hal interaksi masyarakat di Kelurahan Cigending yang mayoritas masyarakatnya sudah modern, masih ada kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk saling membantu dan memberdayakan sekitar agar para ibu rumah tangga mempunyai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pada kelompok usaha abon lele.



Gambar 4.5 Kebersamaan Kelompok Usaha Abon Lele Saat Proses Produksi
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Dari hasil wawancara informan ET juga menjelaskan perubahan sosial lain diantaranya bahwa ada keakraban yang terjadi satu sama lain dengan warga lain dengan adanya saling membantu membeli dagangan yang dijual. Hal serupa juga disampaikan oleh informan NH.

Alhamdulillah banyak yang sudah terbantu, justru dari satu pelaku usaha itu membawa peluang usaha baru buat masyarakat sekitarnya, kayak usaha kelompok gitu kan dari masyarakat untuk masyarakat kan ya jadi senang gitu saling bantu.

Selain dari membantu masyarakat, program UP2K juga memotivasi masyarakat untuk membuka usaha lainnya, seperti yang disampaikan oleh informan TY, “Begitu majunya karena selain banyak banyak anggota up2k yang usaha, banyak usaha baru jadi mereka bermunculan baru itu yang masuk up2k”.

Secara keseluruhan program UP2K ini tidak hanya membantu individu-individu dalam mengembangkan usaha mereka, tetapi juga memicu munculnya berbagai usaha baru di kalangan masyarakat. Program ini berhasil mengubah pola pikir mereka menjauh dari aktivitas mainstream dan lebih kreatif, misalnya dengan memproduksi abon lele sebagai alternatif abon sapi.

Program UP2K ini juga mempererat hubungan sosial, dengan warga saling mendukung melalui pembelian produk dan promosi bersama. Masyarakat menjadi lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan kelompok usaha, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga membangun solidaritas antar warga melalui saling berbagi pengalaman.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Aspek Kondisi Sosial

No (1)	Sub Aspek (2)	Hasil (3)
1	Dukungan Masyarakat dalam Program UP2K	Program UP2K mendapat antusiasme dari masyarakat sekitar, Dukungan sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program juga tak lepas dari peran kader UP2K dan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan UP2K, Faktor-faktor kebersamaan, kreativitas dan keinginan masyarakat untuk mencari tambahan pendapatan juga menjadi hal yang mendukung pelaksanaan program.
2	Dampak Sosial Program UP2K	Program UP2K ini berdampak dalam mempererat hubungan sosial, dengan warga saling mendukung melalui pembelian produk dan promosi bersama. Masyarakat menjadi lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan kelompok usaha, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga membangun solidaritas antar warga melalui saling berbagi pengalaman.

4.2.7 Kondisi Ekonomi Penerima Program UP2K

Kondisi ekonomi menjelaskan bagaimana implementasi program UP2K memberikan perubahan dan dampak dari segi ekonomi kepada masyarakat.

1. Perubahan Kondisi Ekonomi Penerima Program

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat ekonomi meskipun dalam skala kecil sebagaimana yang disampaikan oleh informan NH, “.....jadi nanti pas mungghan dibagikan, karena emang kecil juga ya pendapatanya apalagi kalau produksinya jarang, maksudnya nggak besar gitu tapi ya lumayan”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan NH, informan ET juga menyampaikan hal serupa

Sebenarnya membantu buat yang usaha kecil-kecilan membantu mereka gitu daripada pinjam ke bank emok kan, misalnya pinjam 200.000 kalau kita niat bener mau usaha insyaallah berkembang kan, terbantu lah usaha kecil-kecilan gini dari UP2K.

Penerima program merasakan manfaatnya dalam bentuk tambahan penghasilan yang signifikan, meskipun jangkauan modal yang diberikan tidak besar dan pendapatan bulanan dari penjualan masih terbatas. Program ini dianggap membantu usaha kecil agar tidak harus meminjam ke bank dengan bunga tinggi, meski mereka berharap bisa mendapatkan modal yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, hal ini disampaikan oleh informan RM.

Kalau pinjam modal ke UP2K ini tuh sebenarnya membantu sih ya lumayan walaupun jangkauanya nggak besar, mungkin kelurahan juga milih-milih, lihat-lihat lagi gitu siapa yang diberi modal makanya juga kecil-kecil juga pinjamanya ya coba kalau bisa besar sih pengen ya pinjam besar buat beli bahan baku dan rekrut pegawai.

2. Pengelolaan Pendapatan

Program UP2K juga memperhatikan bagaimana para anggotanya (pelaku usaha) mempertahankan keberlanjutan usahanya, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman modal yang dapat dicicil oleh anggotanya, hal ini disampaikan oleh informan NH.

Ada itu simpan pinjam jadi uangnya berputar dari situ untuk nanti dipinjam lagi gitu buat pengembangan usaha mereka, terus juga pernah ada pelatihan kan yang pembukuan gitu jadi harusnya sudah tahu bagaimana pencatatan biar nggak ada kerugian dan lain lainnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh RM salah satu anggota UP2K, “ya itu permodalan dari simpan pinjam membantu sih buat pinjam lagi buat produksi selanjutnya”.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan pendapatan, mereka memiliki strategi yang berbeda-beda salah satunya adalah melalui permodalan dari simpan pinjam sangat membantu dalam menyediakan dana untuk produksi selanjutnya, memungkinkan usaha terus berjalan dan berkembang.

Bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada anggota UP2K tidak diatur penggunaannya hal itu diserahkan kembali kepada mereka asalkan itu untuk pengembangan usaha yang dilakukan, hal ini disampaikan oleh informan NH.

... yang kelompok atau individu tuh me manage sendiri ya keuangan mereka termasuk penggunaannya seperti apa, kalau yang kelompok itu ya koordinatornya, kalau yang individu gatau mereka pendapatannya berapa gatau, cuma ya kalau mereka sendiri rajin mah ya dicatat pasti ada yang dicatat, harusnya sih ya ada pencatatan atau pelaporan ke kitanya, tapi masih belum ini sih belum ada,

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan NH, informan ET juga menyampaikan hal serupa, “Balik lagi ke masing masing sih ya cuma kalau ibu sih

ya untuk berputar lagi buat beli bahan bahan sama buat nambah-nambah aja kebutuhan sehari hari meskipun nggak banyak”.

Berdasarkan informasi yang didapatkan hambatan dalam pengembangan usaha selama mengikuti program UP2K di Kelurahan Cigending bervariasi antara informan. Pelaku usaha mengalami kesulitan karena kurangnya tenaga kerja dan modal untuk membayar pekerja, sehingga ia terpaksa mengelola usahanya sendiri, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh informan RM.

Kadang-kadang gini ibu tuh keteteran gitu kalau pesanan banyak tapi tenaga kurang, cuma kalau ngambil pekerja kan ibu gaada modal buat kasih upahnya gitu, makanya ibu mikir dan berharap gitu ya kalau ada modal besar ini pasti bisa dapet pesanan banyak dan punya pekerja gitu, jadi ya sekarangmah sendiri aja lah anak kan kerja jadi susah.

Menurut informan NH dan ET selaku pengurus UP2K, mereka menyampaikan hambatannya adalah pembayaran cicilan dari peminjam ke UP2K “paling itu sih yang tadi susah bayar itu karena dianya juga berhutang kesana kesini jadi kita khawatir mau kasih pinjaman juga”. Hal ini menyebabkan UP2K tidak berani untuk memberikan modal yang besar kepada anggotanya.

Harapannya UP2K ini mempunyai pembukuan secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan program UP2K dan data para pelaku usaha yang ada di Kelurahan Cigending sebagaimana yang disampaikan oleh Kasie Ekbang, “Harusnya ada pencatatan pembukuan ya makanya kita juga dari kecamatan suka ada pelatihan pembukuan gitu penting itu buat mengetahui laba untung rugi gitu”.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Aspek Kondisi Ekonomi

No	Sub Aspek	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Perubahan Kondisi Ekonomi Penerima Program	<p>Implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending menunjukkan berbagai dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, manfaat dari program ini terasa meskipun dalam skala kecil.</p> <p>Bantuan modal dari UP2K membantu dalam produksi meskipun tidak cukup untuk penjualan besar-besaran. Hal ini mencerminkan keterbatasan dari sumber daya yang tersedia dalam implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending. Salah satu strategi yang diterapkan oleh UP2K Kelurahan Cigending untuk memastikan keberlanjutan usaha kecil adalah melalui sistem simpan pinjam. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha untuk terus berproduksi dan mengembangkan usahanya. Informan RM juga menegaskan bahwa sistem simpan pinjam sangat membantu dalam menyediakan dana untuk produksi berikutnya, sehingga usaha dapat terus berjalan.</p>
2	Penggunaan Pendapatan	<p>Sebagian besar penerima program memanfaatkan pendapatan dari program UP2K untuk keperluan sehari-hari, bahkan ada informan yang sudah membangun warung sendiri. Namun, ada tantangan dalam pengelolaan keuangan di kalangan penerima program. Ada kendala pula dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum terkelola dengan baik. Kasie Ekbang juga menekankan pentingnya pelatihan pembukuan untuk mengetahui laba dan rugi.</p>

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisa Hasil Penelitian

4.3.1.1 Analisa Aspek Standar dan Sasaran Program

Program UP2K di Kelurahan Cigending didasarkan pada berbagai peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk implementasinya. Pada praktiknya, pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending dimulai pada era Walikota Dada Rosada (2003-2013). Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga melalui dukungan modal untuk setiap kelompok PKK di berbagai kelurahan. Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam struktur pelaksanaannya, program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dijalankan di bawah binaan PKK kecamatan. Pedoman pelaksanaan program ini disusun oleh PKK kecamatan, yang kemudian disampaikan kepada PKK di tingkat kelurahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa para pelaksana di tingkat kelurahan mengaku belum sepenuhnya memahami pedoman tersebut. Akibatnya, mereka cenderung melaksanakan program ini berdasarkan praktik tanpa sepenuhnya memahami pedoman pelaksanaan. Merujuk pada teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad (2013), keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti standar dan sasaran program. Ketidaktepatan pemahaman pedoman oleh para pelaksana di tingkat kelurahan menunjukkan adanya masalah penyebaran informasi seputar teknis pengelolaan pelaksanaan UP2K di tingkat daerah. Sesuai dengan pernyataan ahli lain yakni

P. delon dalam Kasmad (2013) yang juga menekankan bahwa niat baik pemerintah tidak akan menghasilkan hasil positif jika mereka tidak mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan program dengan baik. Dalam hal ini, Kasmad (2013) menjelaskan bahwa implementasi suatu program seringkali gagal di tingkat daerah karena tidak adanya kejelasan perintah terkait pelaksanaan suatu program, yang diinterpretasikan oleh atasan sebagai instruksi kerja dalam bentuk pedoman pelaksanaan program itu sendiri.

Tujuan utama dari program UP2K di Kelurahan Cigending adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang berperan sebagai tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Program ini bertujuan untuk memberikan modal dan pelatihan yang dibutuhkan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Hal ini sesuai dengan teori Van Metter dalam Kasmad (2013) bahwa sebuah program harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Namun, meskipun tujuan program sudah jelas, pelaksanaan UP2K di Kelurahan Cigending masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu masalah utama adalah ketidaklengkapan data pelaporan dari para peserta program. Kurangnya data yang lengkap menghambat proses evaluasi dan monitoring program, sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan program secara akurat. Hambatan ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang lebih efisien dan lengkap untuk mendukung keberhasilan program.

Untuk meningkatkan keberhasilan program UP2K, diperlukan upaya lebih dalam mensosialisasikan standar pelaksanaan kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperbaiki sistem pelaporan dan monitoring. Dengan demikian, program dapat lebih efektif mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kelurahan Cigending.

4.3.1.2 Analisa Aspek Sumber Daya Program

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Cigending menunjukkan bahwa aspek sumber daya program meliputi sumber daya manusia dan non-manusia. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad (2013), sumber daya merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Sumber daya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non-manusia.

Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program ini terdiri dari anggota Pokja 2 PKK dan para pelaku usaha di wilayah tersebut. Pokja 2 PKK berperan sebagai pengurus utama yang meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara, sementara para pelaku usaha bertindak sebagai anggota yang berkontribusi dalam kegiatan usaha. Namun, pemahaman dan pengalaman para pengurus Pokja 2 PKK terkait pelaksanaan program ini masih minim dan masih dalam tahap adaptasi dan penyesuaian. Van Metter dalam Kasmad (2013) menjelaskan bahwa kuantitas personel yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan berpengaruh terhadap implementasi suatu program.

Selain itu, program UP2K di Kelurahan Cigending juga belum menetapkan standar kualifikasi khusus dan pembinaan khusus yang diperlukan SDM untuk terlibat dalam program ini, sedangkan Van Metter dalam Kasmad (2013) menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman SDM. Hal ini bisa menjadi kelemahan karena tanpa standar kualifikasi, kualitas dan kompetensi awal para pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Kondisi ini diperkuat oleh gagasan peneliti implementasi generasi ketiga seperti Levine sebagaimana dikutip dalam Kasmad (2013) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat cenderung gagal saat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sering terlihat dalam kebijakan dan program pembangunan kemiskinan yang dirancang dengan baik seringkali gagal diimplementasikan secara efektif karena berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya pengetahuan kelompok sasaran (Kasmad, 2013).

Aspek sumber daya non-manusia dalam program UP2K meliputi permodalan, sarana prasarana, dan teknologi informasi. Modal awal program berasal dari pemerintah dan lembaga zakat, yang kemudian digunakan dalam sistem simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil. Sistem ini memberikan akses modal dengan jumlah yang terbatas dan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah pembayaran. Dukungan keuangan yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan (Van Metter dalam Kasmad, 2013). Modal awal yang berasal dari pemerintah dan lembaga zakat dalam program UP2K ini menunjukkan dukungan keuangan yang kuat, meskipun sistem simpan pinjam dengan jumlah terbatas menunjukkan adanya batasan dalam ketersediaan modal.

Secara sarana prasarana memang bantuan dalam bentuk peralatan atau bahan baku khusus belum tersedia, namun PKK dan perangkat kelurahan turut memfasilitasi pemasaran produk melalui berbagai kegiatan seperti bazar dan pameran. Van Metter dalam Kasmad (2013) menjelaskan bahwa fasilitas fisik, peralatan, dan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program. Kurangnya bantuan peralatan dan bahan baku dalam program UP2K merupakan kelemahan, namun upaya fasilitasi pemasaran oleh PKK dan perangkat kelurahan sebagian mengatasi kekurangan ini dengan memberikan platform pemasaran yang penting.

Penggunaan teknologi informasi, terutama media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, telah dimanfaatkan untuk promosi produk dan berbagi informasi antar pelaku usaha. Meskipun tidak semua pelaku usaha menggunakan teknologi informasi secara intensif, media sosial terbukti membantu dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan jangkauan produk mereka. Hal ini sesuai dengan teori Van Metter yang dikutip dalam Kasmad (2013) bahwa penggunaan teknologi dan informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari SDM dan pemanfaatan berbagai sumber daya non-manusia untuk mendukung usaha kecil. Namun, pemahaman dan pengalaman yang masih terbatas serta keterbatasan dalam sarana prasarana menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini.

4.3.1.3 Analisa Aspek Karakteristik dan Sikap Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam program UP2K di Kelurahan Cigending memiliki struktur yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pencatatan simpan pinjam. Selain itu dalam pelaksanaannya UP2K memiliki ketua kelompok, yang dimana tugasnya sebagai pengorganisir kelompok usaha di daerahnya (RW). Semua tugas dilaksanakan secara bersama-sama tanpa pembagian yang jelas. Selain itu, ada juga peran dari kasi ekbang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelancaran pembayaran dan mengidentifikasi hambatan yang ada. Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Kasmad (2013) menekankan pentingnya struktur organisasi yang baik untuk memastikan koordinasi yang efektif. Meskipun program UP2K di Kelurahan Cigending sudah memiliki struktur organisasi, dalam pelaksanaannya mereka belum memahami dengan jelas tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan tugas dan tanggung jawab yang lebih rinci untuk setiap peran dalam struktur organisasi agar setiap anggota memahami tanggung jawab mereka dan dapat bekerja lebih efisien.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad (2013), agen pelaksana harus memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang sesuai agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan optimal. Agen pelaksana yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Mereka memahami kebijakan yang diimplementasikan, mengetahui bagaimana mengoperasionalkan kebijakan tersebut, dan mampu menghadapi tantangan teknis yang muncul. Dalam

pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending, agen pelaksana masih tergolong baru dan belum memiliki pengalaman serta pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan UP2K. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kapasitas agar para pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Tantangan utama dalam pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending berkisar pada masalah pembayaran simpan pinjam yang sering kali tidak lancar, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan. Meskipun tidak semua informan melaporkan adanya hambatan besar, beberapa menyebutkan bahwa penjualan produk juga menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi persaingan dan perubahan preferensi konsumen.

Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan yang lebih baik. Agen pelaksana perlu meningkatkan upaya dalam penagihan pembayaran dan mencari solusi kreatif untuk meningkatkan penjualan produk. Pendekatan yang lebih sistematis dalam mengatasi hambatan ini akan membantu mencapai tujuan program dengan lebih baik. Van Metter dalam Kasmad (2013) menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat dalam implementasi kebijakan. Strategi yang lebih terarah dan integratif dalam menangani tantangan tersebut akan membantu meningkatkan kemungkinan keberhasilan sebuah program.

4.3.1.4 Analisa Aspek Hubungan Antar Organisasi/Kemitraan

Kemitraan yang dibangun dalam program UP2K dengan berbagai lembaga sosial, pemerintah daerah, dan dinas terkait menunjukkan interaksi yang kuat antar organisasi. Kolaborasi dengan PKK Kecamatan, koperasi lokal, Dinas UMKM

Kota Bandung, PUSPEL PP, dan Lembaga Sosial Zakatku menggambarkan keterlibatan banyak aktor dalam pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan teori Van Metter dan Van Horn dalam Kasmad (2013) yang menekankan pentingnya hubungan dan koordinasi antar organisasi untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan partisipasi dalam pelatihan, yang berdampak pada kesulitan meningkatkan penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hubungan kemitraan berjalan dengan baik, ada masalah dalam motivasi dan keikutsertaan dalam program peningkatan keterampilan. Kebijakan yang berhasil di satu tempat tidak selalu dapat diterapkan secara langsung di tempat lain karena perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menuntut adaptasi yang cermat agar kebijakan dapat efektif diimplementasikan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, penting untuk dapat beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan dalam kondisi atau dinamika yang mempengaruhi implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending.

4.3.1.5 Analisa Aspek Kondisi Sosial

Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program UP2K di Kelurahan Cigending dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dalam Kasmad (2013) yang menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma, nilai-nilai, struktur sosial, dan pola interaksi antarindividu dan kelompok dalam komunitas tersebut. Pada kenyataan di lapangan, masyarakat Cigending menunjukkan antusiasme

tinggi dan dukungan sosial yang kuat terhadap program ini, yang memotivasi mereka untuk aktif berwirausaha.

Kader UP2K dan pemimpin kelurahan berperan penting dalam menyediakan modal dan memfasilitasi kegiatan yang mempromosikan kreativitas dan kebersamaan. Kebersamaan dan kreativitas masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Hal ini sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn dalam Kasmad (2013) menekankan pentingnya sikap dan respons pelaksana serta masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program. Namun, tantangan seperti preferensi terhadap pekerjaan di luar program UP2K dan kesulitan menarik nasabah untuk pinjaman modal tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan program ini.

Secara keseluruhan, program UP2K di Kelurahan Cigending menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Antusiasme, dukungan sosial, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini. Namun, tantangan seperti preferensi masyarakat terhadap pekerjaan di luar program dan kesulitan menarik nasabah untuk pinjaman modal juga perlu diatasi agar program ini bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Implementasi program UP2K berhasil meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial di Kelurahan Cigending, tetapi perlu strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan yang ada.

4.3.1.6 Analisa Aspek Kondisi Ekonomi

Implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending menunjukkan berbagai dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, manfaat dari program ini terasa meskipun dalam skala kecil. Analisa ini merujuk pada teori implementasi program dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya variabel-variabel tertentu dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program.

Bantuan modal dari UP2K membantu dalam produksi meskipun tidak cukup untuk penjualan besar-besaran. Hal ini mencerminkan keterbatasan dari sumber daya yang tersedia dalam implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh UP2K Kelurahan Cigending untuk memastikan keberlanjutan usaha kecil adalah melalui sistem simpan pinjam. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha untuk terus memproduksi dan mengembangkan usahanya. Informan RM juga menegaskan bahwa sistem simpan pinjam sangat membantu dalam menyediakan dana untuk produksi berikutnya, sehingga usaha dapat terus berjalan.

Namun, ada tantangan dalam pengelolaan keuangan di kalangan penerima program. Ada kendala pula dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum terkelola dengan baik. Kasie Ekbang juga menekankan pentingnya pelatihan pembukuan untuk mengetahui laba dan rugi, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan akan penguatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan usaha kecil.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending memberikan manfaat ekonomi yang signifikan meskipun dalam skala kecil. Program ini mampu memberikan tambahan penghasilan dan modal bagi usaha kecil, membantu mereka menghindari pinjaman dengan bunga tinggi, serta memastikan keberlanjutan usaha melalui sistem simpan pinjam. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan sumber daya, terutama dalam hal permodalan yang lebih besar dan pelatihan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, usaha kecil dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

4.3.2 Analisa Masalah

Implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya konsistensi dalam penerapan standar pelaksanaan, keterbatasan pemahaman dan keterampilan pelaksana, ketidaklengkapan data pelaporan, serta kurangnya keterlibatan dalam pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut analisis masalah dalam Implementasi Program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Belum diterapkannya konsistensi Standar Pelaksanaan Program

Standar pelaksanaan kebijakan harus jelas, dapat diukur, dan disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat. Kenyataannya, meskipun ada pedoman dari kecamatan, pelaksanaan program UP2K di tingkat kelurahan belum sepenuhnya konsisten dengan standar tersebut. Pedoman ini bisa merujuk kepada standar pelaksanaan program UP2K, yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2017, perlu disosialisasikan dengan lebih efektif kepada semua pihak yang terlibat.

2. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Agen Pelaksana

Pelaksana di tingkat kelurahan belum sepenuhnya memahami atau menerapkan standar pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pelatihan yang diberikan mungkin belum mencukupi untuk mengatasi semua kebutuhan keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan program yang efektif. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di antara pelaksana ini dapat menghambat efektivitas program, mengurangi kualitas implementasi, dan membatasi dampak positif yang dapat dicapai.

3. Ketidaklengkapan Data Pelaporan

Ketidaklengkapan data pelaporan dari para peserta program, seperti yang diungkapkan oleh NH, menghambat proses evaluasi dan monitoring program. Sistem pelaporan yang tidak efisien membuat sulit untuk mengukur keberhasilan program secara akurat. Tanpa data yang lengkap dan akurat, sulit untuk melakukan evaluasi yang efektif terhadap program, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal.

4. Penurunan Partisipasi dalam Kegiatan Pelatihan

Penurunan partisipasi dalam pelatihan dapat menghambat upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Meskipun tujuan program sudah jelas, penurunan

partisipasi dalam pelatihan ini menunjukkan adanya masalah dalam motivasi dan keikutsertaan para pelaku usaha dalam program peningkatan keterampilan.

Berdasarkan analisis di atas, program UP2K di Kelurahan Cigending menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam implementasinya, yang mencakup masalah dalam sosialisasi standar pelaksanaan, ketidaklengkapan data pelaporan, keterbatasan pemahaman dan keterampilan pelaksana, serta penurunan partisipasi dalam pelatihan. Untuk meningkatkan keberhasilan program UP2K, diperlukan upaya yang lebih dalam mensosialisasikan standar pelaksanaan kepada seluruh pemangku kepentingan, memperbaiki sistem pelaporan dan monitoring, serta meningkatkan motivasi dan keikutsertaan para pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan insentif yang tepat. Dengan demikian, program dapat lebih efektif mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kelurahan Cigending.

4.3.3 Analisa Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisa masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun analisis kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Sosialisasi Standar Pelaksanaan Program UP2K

Standar pelaksanaan program UP2K, yang telah diatur dalam struktur kepengurusan tingkat kecamatan/kota perlu disosialisasikan dengan lebih efektif kepada semua pihak yang terlibat. Sosialisasi ini harus mencakup pemahaman yang jelas tentang prosedur, kriteria, dan tujuan dari program tersebut serta

bagaimana mereka menjalankan, mengidentifikasi kebutuhan dan membuat pelaporan yang cermat dan dapat diukur.

2. Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Agen Pelaksana

Pelatihan yang lebih intensif dan relevan perlu diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tim pelaksana dalam mengelola program UP2K, termasuk manajemen keuangan, keterampilan pengemasan, dan inovasi produk.

3. Peningkatan Motivasi dan Partisipasi Penerima Manfaat/ Peserta

Strategi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta dalam program, terutama dalam kegiatan pelatihan, perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Ini memerlukan kampanye penyadaran dan insentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program UP2K, serta pemantauan yang lebih ketat dari pengurus untuk memastikan kehadiran yang lebih konsisten.

Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, program UP2K di Kelurahan Cigending dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini akan membantu dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi dan meningkatkan kualitas implementasi program secara keseluruhan. Dengan demikian, program dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

4.3.4 Analisa Sistem Sumber

Dalam konteks implementasi Program UP2K di Kelurahan Cigending, berikut adalah rincian analisis mengenai sistem sumber menggunakan teori Alin

Pincus dan Minahan yang dikutip dari Sukoco (2021) yakni sistem sumber formal, informal dan kemasyarakatan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Sumber Informal

Sumber Ini mencakup jaringan informal yang sering kali menjadi sumber informasi, dukungan, dan advokasi. Hubungan informal ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara profesional dalam bidang tersebut. Tim Penggerak PKK dapat dimanfaatkan sebagai sumber informal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dari masalah dan hambatan yang dimiliki oleh para kader dalam menjalankan program UP2K. Mereka berperan penting dalam pertukaran informasi, koordinasi aksi, dan berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan program ini. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi sosial di tingkat masyarakat.

2. Sumber Formal

Sumber formal dalam konteks program UP2K mencakup institusi-institusi resmi yang terlibat langsung dalam kemitraan dan pelaksanaan program tersebut. Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung UP2K melalui penyediaan bantuan dan pendampingan bagi UMKM yang merupakan salah satu fokus program ini. Mereka menyediakan kerangka kerja formal, panduan, dan sumber daya administratif untuk membantu UMKM memanfaatkan program UP2K. Pihak Kecamatan Ujung Berung juga merupakan sumber formal. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi program di tingkat lokal, memastikan bahwa program ssesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

3. Sumber Kemasyarakatan

Komunitas lokal tempat UP2K diimplementasikan adalah sumber daya utama. Nilai-nilai budaya, norma sosial, dan sumber daya lokal seperti tokoh masyarakat dan kelompok pelaku usaha memainkan peran kunci dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memastikan partisipasi aktif dari masyarakat sasaran.

BAB V

USULAN PROGRAM

5.1 Dasar Pemikiran

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan salah satu inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kader dalam melaksanakan program tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi program UP2K adalah keterbatasan pengetahuan kadernya. Kader belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait pedoman pelaksanaan UP2K itu sendiri dan cara-cara menjalankan usaha ekonomi produktif. Mereka kurang memahami konsep dasar kewirausahaan, manajemen usaha, serta strategi pemasaran yang efektif hal ini berakibat pada pengembangan usaha masyarakat yang dijalankan dalam program UP2K. Selain itu, kader juga menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya pelatihan, baik dalam bentuk modul, workshop, maupun seminar.

Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung. Keluarga yang terlibat dalam program UP2K seringkali mengalami kesulitan dalam

mengakses modal dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Minimnya akses terhadap modal menyebabkan banyak usaha yang tidak dapat berkembang atau bahkan tidak dapat dimulai sama sekali. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti tempat produksi, peralatan, dan teknologi juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program UP2K ini.

Melihat permasalahan yang ada, diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dibutuhkan program untuk meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan intensif, bimbingan teknis, pendampingan, dan optimalisasi sumber daya, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Dengan pendekatan holistik dan terkoordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk efektivitas pelaksanaan program UP2K.

5.2 Nama Program

Program yang dirancang berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang telah diuraikan dalam bentuk program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing”.

5.3 Tujuan Program

Program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing” memiliki tujuan umum dan khusus sebagai berikut.

5.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum program ini yaitu meningkatkan kapasitas kader UP2K dalam melaksanakan program UP2K di Kelurahan Cigending.

5.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing” ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan dan komitmen kader UP2K terhadap pelaksanaan program UP2K
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader UP2K dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal untuk kegiatan UP2K

5.4 Sasaran

Sasaran dari program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing” terdiri dari kader UP2K berjumlah 34 orang.

5.5 Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat beberapa unsur penting yaitu sistem partisipan dan pengorganisasian program. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua unsur tersebut dalam konteks usulan program yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.5.1 Sistem Partisipan

Sistem partisipan mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

5.5.1.1 Sistem Pelaksana Perubahan

Sistem pelaksana perubahan merupakan sekelompok orang yang berperan dalam mencapai perubahan bagi sasaran. Fungsi sistem pelaksana perubahan adalah sebagai pusat yang mengatur pemecahan masalah. Sistem pelaksanaan perubahan dalam program ini yaitu sebagai berikut.

1. Lurah Kelurahan Cigending akan menjadi mitra kerja utama. Pihak kelurahan akan berperan sebagai penyedia fasilitas untuk kegiatan program, termasuk penyediaan tempat dan sarana pendukung lainnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan memiliki dukungan logistik yang memadai. Dukungan dari pemerintah kelurahan juga akan memperkuat koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa setiap aspek program dapat berjalan dengan baik.
2. Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Cigending, berperan sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi pedoman pelaksanaan UP2K
3. Pekerja Sosial dari Poltekesos Bandung, berperan sebagai narasumber dalam pemberian manteri dasar-dasar pemberdayaan serta penguatan komitmen kader dalam pelaksanaan UP2K di kelurahan Cigending
4. Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Koperasi dan UMKM, berperan sebagai narasumber dalam meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan UP2K yang dilakukan kader UP2K Cigending.

5.5.1.2 Sistem Klien

Sistem Klien adalah sekelompok orang atau pihak yang akan menerima pelayanan atau manfaat dari program. Sistem klien pada program ini yaitu kader UP2K berjumlah 34 orang.

5.5.1.3 Sistem Sasaran

Sistem sasaran adalah pihak yang hendak dipengaruhi atau dirubah supaya tujuan program dapat tercapai secara maksimal sistem sasaran dalam program ini yaitu kader UP2K dan Tim Penggerak PKK.

5.5.1.4 Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini yakni sosialisasi pedoman pelaksanaan UP2K oleh Kasi Ekbang Kecamatan Ujung Berung, Penyuluhan dan penguatan dasar-dasar pemberdayaan serta pelatihan kewirausahaan.

5.5.2 Pengorganisasian Program

Sistem pengorganisasian program ini terdiri dari tim kerja (team work) yang berperan sebagai aktor utama dalam mencapai tujuan program. Tugas pokok dan fungsi sistem pengorganisasian program adalah sebagai berikut.

1. Penanggung Jawab Kegiatan

Dalam program ini, Lurah Cigending bertindak sebagai penanggung jawab dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program secara keseluruhan

2) Memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan program baik dalam kegiatan rapat maupun pada bagian tertentu dalam struktur organisasi.

2. Ketua Pelaksana

Dalam program ini, Ketua TP PKK Kelurahan Cigending bertindak sebagai ketua pelaksana. Adapun tugas ketua pelaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan program secara teknis
- 2) Menyusun rencana program bersama anggota panitia
- 3) Mengadakan koordinasi antar staf dan instansi terkait
- 4) Memberikan pengarahan kepada anggota-anggotanya
- 5) Ketua pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan program

3. Sekretaris

Dalam program ini, sekretaris adalah sekretaris PKK. Adapun tugas dan fungsi sekretaris adalah sebagai berikut.

- 1) Mengatur jalannya aktivitas surat menyurat
- 2) Mengatur administrasi lainnya
- 3) Mengarsipkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan program
- 5) Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua pelaksana program.

4. Bendahara

Dalam program ini, bendahara adalah anggota pengurus TP PKK. Adapun tugas dan fungsi bendahara adalah sebagai berikut.

- 1) Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan
- 2) Mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan keuangan

3) Menyusun pertanggungjawaban keuangan yang akan dilaporkan kepada ketua pelaksana

4) Bendahara bertanggung jawab kepada ketua pelaksana program dan berkoordinasi dengan sekretaris.

5. Divisi Acara

Divisi acara dalam program ini dipegang oleh pengurus PKK. Tugas divisi acara meliputi menyusun rangkaian dan konsep kegiatan, mengatur jadwal acara sesuai dengan waktu pelaksanaan, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama program berlangsung, serta mengoordinasikan dan memfasilitasi kelompok agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik.

6. Divisi Humas

Divisi humas dalam pelaksanaan program ini adalah pengurus TP PKK Kelurahan Cigending. Tugas dan fungsinya meliputi koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan serta melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan.

7. Divisi Logistik

Divisi Logistik atau perlengkapan adalah individu yang bertanggung jawab atas kelengkapan alat yang dibutuhkan selama pelaksanaan program.

8. Divisi Konsumsi

Divisi konsumsi adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan konsumsi selama pelaksanaan program. Tugas divisi konsumsi meliputi menyiapkan makanan dan snack untuk peserta kegiatan.

5.6 Metode dan Teknik

5.6.1 Metode

Program "Pelatihan dan Pengembangan Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing" dilakukan dengan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* sebagai pendekatan utamanya. Metode ini dipilih karena fokusnya yang kuat pada pemberdayaan komunitas dan mampu menangani kompleksitas masalah dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif. CO/CD berfokus pada pemberdayaan komunitas melalui analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kader, kurangnya partisipasi masyarakat, penyebaran informasi yang tidak efektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan menggunakan metode ini, program akan melibatkan kader PKK secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan CO/CD juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kelurahan dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memberdayakan seluruh komunitas Kelurahan Cigending dalam meningkatkan implementasi UP2K.

5.6.2 Teknik

Teknik yang digunakan dalam metode *community organization/community organization* atau pengembangan komunitas adalah pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui kerjasama dan pengembangan kapasitas. Dalam konteks program "Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing," teknik yang digunakan adalah teknik kerja

sama (*collaboration*), sementara taktik yang diterapkan mencakup implementasi dan membangun kapasitas (*capacity building*).

Teknik kerja sama adalah strategi utama dalam metode *community organization*. Dalam program ini, teknik ini diwujudkan melalui pelatihan kader dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan institusi, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerja sama yang baik memungkinkan aliran informasi, sumber daya, dan dukungan yang lancar, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih mudah.

Implementasi kerja sama dalam pelatihan kader merupakan langkah awal yang krusial. Dalam tahap ini, para kader dilibatkan dalam sesi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti dinas Koperasi dan UMKM. Dengan demikian, para kader mendapatkan perspektif yang lebih luas dan beragam tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).

5.7 Kegiatan yang Dilakukan

Program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing” ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program UP2K oleh Kasi Ekbang Kecamatan

Sosialisasi diberikan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh agen pelaksana, anggota PKK, dan masyarakat tentang pedoman pelaksanaan program UP2K. Sosialisasi ini akan membahas tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan program secara rinci. Materi yang disampaikan meliputi struktur organisasi program, tanggung jawab setiap peran, mekanisme pengajuan dan pengelolaan pinjaman, serta strategi pengembangan usaha.

2. Penyuluhan Pemberdayaan Sosial oleh Pekerja Sosial dari Poltekesos

Penyuluhan ini untuk memperkuat dukungan dan motivasi pengurus atau agen pelaksana tentang dasar-dasar pemberdayaan sosial yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UP2K.

3. Pelatihan *Enterpreneurship* oleh Dinas UMKM Kota Bandung

Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan pelaksana UP2K. Pelatihan *Enterpreneurship* ini mencakup berbagai topik penting seperti bagaimana memulai usaha, pengelolaan usaha kecil dan menengah, serta strategi pemasaran yang efektif. Dalam pelatihan ini diajarkan tentang dasar-dasar kewirausahaan, termasuk identifikasi peluang bisnis, perencanaan usaha, manajemen risiko, dan inovasi produk. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah untuk membekali kader dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

5.8 Langkah-langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan program ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal pelaksanaan program yaitu sebagai berikut.

- 1) Asesmen Masalah: Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan program UP2K di Kelurahan Cigending
- 2) Asesmen Kebutuhan: Dilakukan untuk mengetahui kebutuhan berdasarkan hasil asesmen masalah.
- 3) Asesmen Sistem Sumber: Tujuannya adalah mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian masalah dan pelaksanaan program.

2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum program dilaksanakan. Rangkaian ini dimulai dari melakukan koordinasi, membentuk tim pelaksana kegiatan, rapat koordinasi, menentukan materi, menyusun proposal, pengajuan proposal, mengurus perizinan dan undangan, hingga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan dengan penjelasan setiap kegiatan sebagai berikut

1) Koordinasi dengan Kader dan Pemerintah Kelurahan

Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Cigending untuk melaporkan rencana kegiatan dan mendapatkan izin pelaksanaan. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan pengurus TP PKK dan para kader sebagai sasaran utama perubahan.

2) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Dilakukan untuk mengumpulkan anggota tim pelaksana kegiatan setelah memperoleh izin dari pemerintah Kelurahan Cigending. Tim ini akan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi bidang.

3) Rapat Koordinasi dan Menentukan Jadwal Kegiatan

Rapat koordinasi dilaksanakan setelah terbentuk panitia kegiatan sesuai dengan posisi dan tugas yang diperlukan. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama mengenai keperluan yang dibutuhkan, serta saling menyampaikan tugas dan fungsi masing-masing panitia sesuai tanggung jawabnya. Rapat koordinasi juga bertujuan untuk menentukan jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanakan yang dilakukan oleh panitia kegiatan bersama kader PKK. Kegiatan yang dilaksanakan yakni saling menyamakan informasi dan saling bekerja sama mengenai program yang akan dilaksanakan.

4) Menentukan Materi dan Narasumber

Panitia kegiatan menentukan materi yang akan disampaikan dan menentukan narasumber yang ahli di bidangnya untuk pelaksanaan kegiatan. Narasumber pada program ini yaitu Kasi Ekbang Kecamatan, Peksos dari Poltekesos Bandung, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

5) Menyusun dan Mengajukan Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan setelah melalui tahap perencanaan bersama oleh panitia kegiatan. Proposal ini mencakup latar belakang

kegiatan, tujuan, sasaran, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Dokumen ini kemudian diajukan kepada pihak Kelurahan Cigending untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan.

6) Menyampaikan Undangan

Undangan kegiatan disampaikan kepada para kader UP2K yang diharapkan dapat berpartisipasi sebagai sasaran utama dari program ini.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini adalah implementasi dari rencana kegiatan yang telah disusun oleh panitia. Program akan berlangsung selama satu hari di Kelurahan Cigending. Susunan acara program dijelaskan dalam tabel berikut.

Matriks 5.1 Susunan Acara Program

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
08.00 - 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Sekretaris
08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan	Pembawa Acara
08.40 – 08.45 WIB	Sambutan Ketua Panitia	Ketua PKK
08.45 – 09.00 WIB	Sambutan Kelurahan	Lurah Cigending
09.00 – 10.00 WIB	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan UP2K	Kasie Ekbang Kecamatan Ujung Berung
10.00 – 11.00 WIB	Penyuluhan Dasar-dasar Pemberdayaan	Peksos dari Poltekesos Bandung
11.00 – 11.30 WIB	Sesi Tanya Jawab	Divisi Acara
11.30 – 12.30 WIB	Isoma	
12.30 – 13.30 WIB	Pelatihan <i>Entrepreneurship</i>	Dinas Koperasi dan UMKM
13.30 – 14.30 WIB	Sesi Tanya Jawab	Divisi Acara
14.30 – 15.00 WIB	Penutup dan Dokumentasi	Divisi Acara dan Humas

4. Tahap Pengakhiran

Tahap penutupan adalah tahap akhir dari serangkaian kegiatan yang melibatkan evaluasi dan pelaporan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

1) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan merupakan tinjauan terhadap proses dan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap langkah-langkah yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan kegiatan. Sementara evaluasi hasil bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Tahap evaluasi hasil juga mencermati hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program.

2) Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait, serta seluruh pihak yang terlibat. Laporan disusun secara tertulis oleh panitia dari setiap divisi, mencakup proses kegiatan, aspek keuangan, kendala yang dihadapi, pencapaian hasil, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan program di masa mendatang.

5.9 Rencana Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Rencana anggaran biaya dilakukan oleh panitia kegiatan yang bertanggung jawab dalam membuat anggaran biaya seperti bendahara yang berkoordinasi dengan setiap seksi dengan melaporkan kebutuhan

yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dan disesuaikan dengan PMK/59/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.1 Rencana Anggaran Biaya Program

Kebutuhan	Volume	Satuan		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Logistik					
a. ATK	1	Paket	1 kali	200.000	200.000
b. Spanduk	1	Pcs	1 kali	60.000	60.000
c. Surat Undangan	45	Lembar	1 kali	500	22.500
d. Pelaporan	1	Paket	1 kali	200.000	200.000
Honorium					
a. Kasie Ekbang Kecamatan Ujung Berung	1	Orang	2 JP	700.000	1.400.000
b. Kabid Ekraf Dinas UMKM Koperasi Kota Bandung	1	Orang	2 JP	700.000	1.400.000
c. Peksos dari Poltekesos	1	Orang	1 JP	900.000	900.000
d. Lurah Cigending	1	Orang	OK	450.000	450.000
e. Ketua Pelaksana	1	Orang	OK	400.000	400.000
f. Sekretaris Kegiatan	1	Orang	OK	350.000	350.000
g. Bendahara Kegiatan	1	Orang	OK	300.000	300.000
g. Anggota Divisi	7	Orang	OK	300.000	2.100.000
Konsumsi					
a. Konsumsi Narasumber	3	Orang	1 Kali	40.000	120.000
b. Konsumsi Panitia	8	Orang	1 Kali	40.000	320.000
c. Konsumsi Peserta	34	Orang	1 Kali	40.000	1.360.000
Transportasi					
Narasumber	3	Orang		200.000	600.000
Total Keseluruhan					10.182.500

Sumber: RAB Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa total anggaran biaya program ini sebanyak Rp.10.182.500,-. Dana tersebut bersumber dari anggaran Pemerintah Kelurahan Cigending.

5.10 Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan program ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari program yang telah direncanakan. Analisis yang dilakukan menggunakan metode SWOT yang dipaparkan sebagai berikut.

Matriks 5.2 Analisis SWOT Kelayakan Program

<div style="text-align: center;"> Internal <hr style="border: 1px solid black;"/> Eksternal </div>	Strength (S)	Weakness (W)
		1) Adanya komitmen dari kader UP2K 2) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Pemerintahan Kelurahan 3) Sudah terbentuknya strukturkepengurusan yang solid
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
1) Dukungan dari masyarakat Kelurahan Cigending. 2) Dukungan dari pemerintah Kelurahan Cigending. 3) Dukungan dari dinas terkait yang menjadi narasumber 4) Banyaknya sistem sumber yang dapat diakses	1) Menjalin kerja sama dengan seluruh pihak yang dapat membantu program 2) Melibatkan kepala kelurahan dalam pelaksanaan program 3) Melibatkan dinas terkait atau ahli dibidangnya sebagai narasumber	1) Membuat materi yang aplikatif dan mudah dipahami 2) Rutin melaksanakan rapat pengurus 3) Membuat rencana pelaksanaan program jauh-jauh hari
Treat (T)	Srategi ST	Strategi WT
1) Rasa jenuh peserta selama mengikuti kegiatan 2) Sulit menyesuaikan jadwal dengan narasumber	1) Mengundang kader dari jauh-jauh hari 2) Mengadakan ice breaking dan sesi demonstrasi yang melibatkan peserta 3) Selalu memastikan kembali kepastian hadir narasumber	1) Membuat rencana kegiatan secara jelas dan terperinci 2) Mempublikasikan kegiatan di papan informasi kelurahan/ RW dari jauh-jauh hari

5.11 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program UP2K di Kelurahan Cigending dijadikan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program yang telah dicanangkan sehingga dapat diperbaiki. Indikator keberhasilan dari program tersebut sebagai berikut.

1. Meningkatnya pengetahuan dan komitmen kader terhadap pelaksanaan UP2K
2. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader dalam pengembangan usaha ekonomi keluarga
3. Teroptimaliasinya sumber daya yang tersedia dalam program UP2K

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian mengenai implementasi program UP2K di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung menunjukkan bahwa program ini didasarkan pada berbagai peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk implementasinya. Pada praktiknya, pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Cigending dimulai pada era Walikota Dada Rosada (2003-2013). Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga melalui dukungan modal yang digulirkan kepada setiap kelompok PKK di berbagai kelurahan. Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji lima aspek utama dalam proses implementasi program UP2K yakni standar dan sasaran program, sumberdaya program, hubungan kemitraan, karakteristik dan sikap agen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi yang didapat melalui proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun tujuan dan sasaran program sudah jelas, pemahaman dan implementasi di tingkat kelurahan masih belum optimal. Aspek sumber daya yang tersedia terdiri dari sumber daya manusia dan non-manusia. Sumber daya manusia dalam program ini mencakup para kader Pokja 2 dan para pelaku usaha, sedangkan sumber daya non-manusia terdiri dari pemberian modal dan fasilitas pemasaran saja. Agen pelaksana lebih

banyak berfokus pada pemberian simpan pinjam modal dan pelatihan yang dilaksanakan hanya mengikuti arahan dari kecamatan sebagai mitra utama dalam program ini. Namun, kurangnya pemahaman mendalam mengenai program UP2K di antara agen pelaksana di tingkat kelurahan menjadi salah satu kendala utama. Padahal, dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat setempat antusias untuk mengikuti program ini. Hal ini disebabkan oleh keinginan dan kemampuan berwirausaha yang dimiliki banyak warga, serta adanya kebersamaan yang kuat dalam membentuk kelompok usaha. Kebersamaan ini mempermudah koordinasi dan kerjasama antar anggota, yang menjadi modal berharga dalam pengembangan program.

Dapat disimpulkan bahwa program UP2K memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal jika dapat dioptimalkan dengan baik oleh para agen pelaksana yang terlibat. Untuk memaksimalkan potensi program UP2K, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kapasitas agen pelaksana di tingkat kelurahan. Maka dari itu, peneliti mengusulkan program “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader Menuju UP2K yang Berdaya Saing” dalam upaya mengembangkan kapasitas kader UP2K agar mampu menjalankan program dengan optimal. Kegiatan ini berisi sosialisasi pedoman pelaksanaan UP2K oleh pihak kecamatan, penyuluhan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga oleh peksos dari Poltekesos, setelah itu ditunjang dengan pengembangan ketarampilan *entrepreneurship* (kewirausahaan).

6.2 Saran

6.2.1 Saran Guna Laksana

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah berbagai saran untuk mengoptimalkan program UP2K di Kelurahan Cigending.

1. Saran untuk Kader UP2K

Berikut adalah saran yang dapat dilakukan kader agar mampu melaksanakan program UP2K secara optimal.

- 1) Mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan pelaku usaha lokal untuk bertukar ide dan mencari peluang kolaborasi.
- 2) Mengajak pelaku usaha sukses atau mengundang pakar inovasi untuk menjadi mentor atau pembicara dalam pelatihan atau workshop yang diadakan oleh kader UP2K.
- 3) Mengadakan kompetisi inovasi produk di kalangan ibu rumah tangga dan pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk baru yang unik dan bernilai jual tinggi.
- 4) Menyediakan bantuan fasilitas yang tidak hanya berbentuk modal tetapi juga fasilitas fisik seperti alat-alat produksi yang bisa didapatkan dari kemitraan dengan lembaga riset atau perusahaan lain

2. Saran untuk Pemerintah Kelurahan Cigending

Dalam menunjang pelaksanaan program UP2K yang lebih optimal, berikut saran bagi pemerintah Kelurahan Cigending.

- 1) Menyediakan lebih banyak pelatihan dan workshop yang fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaksanaan program UP2K seperti pelatihan pencatatan dan pelaporan bagi kader UP2K.

- 2) Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pihak kecamatan dan instansi lain untuk memastikan program UP2K di Kelurahan Cigending dapat berjalan dengan efektif.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program UP2K dan memberikan umpan balik kepada para kader.

6.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkaya penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih dalam aspek kondisi sosial dalam implementasi program UP2K. Tujuannya untuk memahami peran nilai-nilai lokal, budaya, dan dinamika sosial dalam pelaksanaan program UP2K serta mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program. Penelitian ini dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus grup dengan peserta program, pemimpin komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif (perbandingan) dua daerah yang telah berhasil mengimplementasikan program UP2K untuk mengidentifikasi lebih rinci praktik-praktik terbaik yang dilakukan para agen pelaksana di wilayah tersebut sehingga hasilnya dapat dijadikan referensi pelaksanaan program UP2K yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmad, Rulinawaty. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai. Aksara.
- Moleong, Lexy. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Badrul. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bappeda. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

Sumber Jurnal:

- Akib Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 (1).
- Budiartiningsih. (2010). Peranan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2k) Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, Vol 18 (4).
- Glori Christin, dkk. (2023). Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Terhadap Kesejahteraan Anggota Wanita Tani Suka Maju Desa Ajaobaki. *Jurnal of Comprehensive Science*, Vol 2 (10).
- Marcelino Vincentius. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural Di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa* Vol 5 (3).

Mariatul dan Wati Nilamsari. (2022). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol 3 (1).

Pratiwi Aurelia. (2022). Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 5 (1).

Ulfa Nabila, dkk. (2023). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Up2k-Pkk) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3 (2).

Sumber Internet:

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Retrieved February 10, 2024 from <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>

Open Data Kota Bandung. (2022). *Data Sebaran Kemiskinan di Kota Bandung*. Retrieved February 26, 2024 from <http://satudata.bandung.go.id/dataset/sebaran-kemiskinan-di-kota-bandung/resource/d0b8a47f-e630-4f95-afc7-d193de6a0d2c>

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). *Profil Kemiskinan Kota Bandung*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Modul Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu Bappenas tahun 2004.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No 17 tahun 2020 tentang pengelolaan kelompok UP2K

Undang-Undang No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.